

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN KEUANGAN PEMERINTAH:
PERSPEKTIF KOMITMEN ORGANISASI
(STUDI KASUS PADA PEMDA KABUPATEN BONE)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Akuntansi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

SYAHRAENI
10800113160

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahraeni

Nim : 10800113160

Tempat/Tgl. Lahir : Batu Gading, 08 November 1995

Jur/Prodi/konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam

Alamat : Pesona Pelangi Residence, Blok B₄ No. 22 Moncongloe

Judul : Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan
Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi
Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,

2018

Penyusun,



SYAHRAENI

NIM. 10800113160



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II: Jl. Slt. Alauddin No. 36 SamataSungguminasa – GowaTlp. 424835 Fax.424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Bone)” yang disusun oleh **SYAHRAENI**, NIM: 10800113160, Mahasiswi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 31 agustus 2018, bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1439 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, 31 Agustus 2018
19 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag.
Penguji I : Dr. Amiruddin K, M.Ei
Penguji II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I : Jamaluddin M, SE., M.Si.
Pembimbing II : Puspita H. Anwar, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Alauddin Makassar.



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19580221 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta ilmu pengetahuan yang kau limpahkan, Atas perkenan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli Ala Muhammad Waala Ali Muhammad” juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Peyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah : Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Bone)”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang singkat selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan-hambatan dan tantangan, namun hambatan-hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi

ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah Herman dan Ibu Nurmalia, yang telah memberikan segala dukungannya yang luar biasa kepada penulis. Baik berupa kasih sayang, dukungan normal dan materi serta doa yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan serta rezeki kepada kedua orang tua penulis.

Terimah kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbasari, M.Si Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ambo Asse., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dan selaku pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberi bimbingan, arahan, petunjuk dari membuat Proposal hingga rampungnya skripsi.
4. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Ibu Puspita Hardianti Anwar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPAI. Selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu

dan pikirannya untuk memberi bimbingan, arahan, perunjuk mulai persetujuan judul, proposal hingga rampungnya skripsi.

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik dan tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
8. Seluruh staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
9. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Bone atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini yang sama juga peneliti sampaikan kepada Narasumber yang memberikan penjelasan kepada peneliti, semoga bantuan yang diberikan oleh pihak mendapat balasan dari Allah SWT.
10. Kepada Bapak Dispenda Kabupaten Bone atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini yang sama juga peneliti sampaikan kepada Narasumber yang memberikan penjelasan kepada peneliti, semoga bantuan yang diberikan oleh pihak mendapat balasan dari Allah SWT.
11. Seluruh keluarga terutama Ayahanda Herman dan ibu Nurmalia, beserta kakak (khaerunnisa, Amd.Kep) dan adik-adik (Sriwahyuni, Zul Qurniati dan Wahdaniatil Fahmi). Terimah kasih atas doa, perhatian, kesabaran,

dukungan, semangat dan ridhonya yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Saudara tak sedarah Hapriyani Hanas., Alfiani S, Dian wahyu Saputri, dan Nurul Ulfayanti Adam, yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk segera mendapatkan gelar sarjana.
13. Sahabat-sahabatku yang selalu diberi julukan Ikang Mairo (Haerani, S.Ak., Nurul Aini Ridwan, S.Ak., Juliastuti Rahman, S.Ak., Sari Fatimah Mus, S.Ak., Manikam Aprilani dan Fitra Rahayu) yang selalu setia membantu, memberi semangat dan motivasi sekaligus teman seperjuangan dalam penyelesaian studi.
14. Teman-teman kelas Akuntansi D yang telah menjadi teman sekelas dan teman berbagai cerita selama kurang lebih 4 tahun di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
15. Teman-teman angkatan 2013 jurusan Akuntansi yang tidak bisa penulis sebut persatu yang selama ini memberikan banyak motivasi, bantuan dan telah menjadi teman diskusi yang hebat dan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 54 Kecamatan Tellu Limpoe terkhusus saudara-saudaraku posko 10 Desa Bua (Hardianyanti, Hasrianti Mustakim, Nurmadinah, Mustakim, Rusman, Ahmad, Mansyur) terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan.

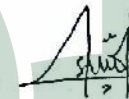
17. Semua keluarga, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, semoga bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar,

2018



SYAHRAENI

NIM:10800113160

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

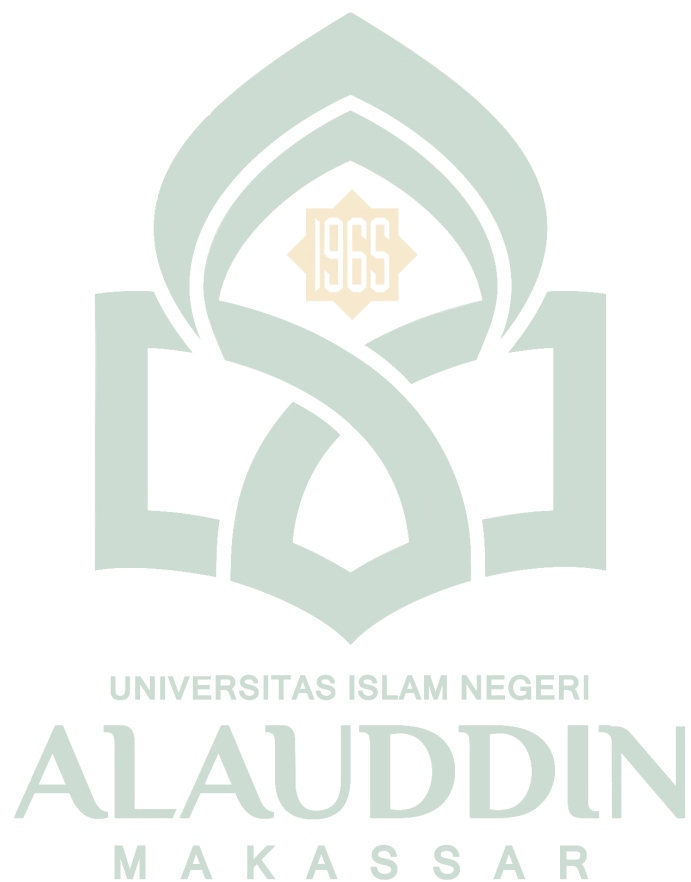
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN.	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Penelitian Terdahulu	12
E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS	15-32
A. Teori Stewardship	15
B. Teori Harapan	18
C. Teori Bakti	20
D. Kebijakan Pengelolaan Pajak.....	21
E. Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah	25
F. Komitmen Organisasi	26
G. Rerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33-37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian	35
F. Metode Analisis	36
G. Uji Keabsahan Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 38-86

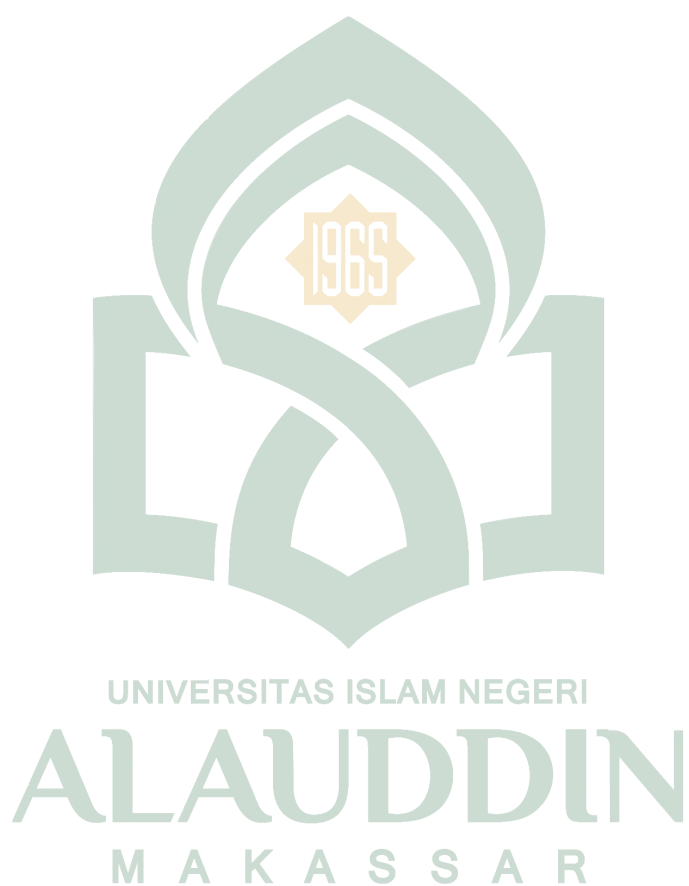
A. Hasil Penelitian Di Kabupaten Bone	38
1. Sejarah Kabupaten Bone	38
2. Letak Geografis	42
3. Batas Wilayah	42
4. Luas Wilayah.....	42
5. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan.....	43
6. Kondisi Sosial dan Budaya	44
7. Sarana dan Prasarana.....	44
a) Pendidikan	44
b) Kesehatan	45
c). Pekerja Umum.....	47
8. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Bone	48
a). Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone.....	51
1). Visi	51
2). Misi	52
b). Tujuan dan Sasaran	52
1). Tujuan	53
2). Sasaran	55
9. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone.....	62
10. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	64
a). Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	71
1) Visi	71
2) Misi	72
b). Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	73
B. Pembahasan Penelitian.....	75
1. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bone	75
2. Perspektif Komitmen Organisasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Pajak Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bone	78
a) Peranan <i>Stewardship Theory</i> Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah	81

b) Penerapan Teori Harapan Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah	82
c) Peranan Teori Bakti Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87-89
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90-93
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Informan penelitian.....	34
Tabel 4.1	: Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Bone	43
Tabel 4.2	: Nama-nama Bupati Kabupaten Bone.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi DISPENDA Kabupaten Bone	74



ABSTRAK

Nama : Syahraeni
Nim : 10800113160
Judul : Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui perspektif komitmen organisasi terhadap kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara di instansi pemerintah daerah Kabupaten Bone. Informan dipilih dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara menjelaskan data-data yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pajak daerah Di Kabupaten Bone masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pajak serta kurang sanksi yang tegas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat serta komitmen organisasi yang masih kurang dan masih lebih mementingkan pribadi masing-masing dibandingkan kepentingan kelompok sehingga hal ini memberikan dampak yang kurang baik dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang kurang maksimal baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan yang tidak merata.

Kata Kunci : Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah, Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah, Komitmen Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah Indonesia disamping sektor migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Brenann (1980) menyatakan bahwa hal tersebut tergantung pada respon wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan masyarakat (Meutia, 2007). Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakikatnya adalah perubahan yang berlangsung secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju arah yang ingin dicapai.

Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penyelenggaraan keuangan untuk membiayai keperluan daerah (Pamuji, 2014). Dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bone menjadi suatu perhatian khusus, dimana wajib pajak daerah seakan tidak mau membayar pajak dikarenakan adanya pembayaran berganda yaitu sebagai seorang muslim membayar pajak dan juga zakat sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan di Kabupaten Bone. Minat masyarakat untuk membayar pajak

menurun dikarenakan mereka lebih takut kepada Allah SWT dibandingkan sesama manusia (Suprayitno, 2015). Sehingga paham ini juga perlu penjelasan yang sangat detail dikalangan masyarakat untuk mendapatkan atau meningkatkan kembali minat mereka untuk membayar pajak. Pelaksanaan pajak daerah seharusnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada di PEMDA yaitu mampu meningkatkan pendapatan asli daerah akan tetapi sampai saat ini pelaksanaan pajak masih bertentangan dengan prinsip efisiensi.

Salah satu alasan penyelenggaraan keuangan daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitikberatkan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Menurut Suparmako (2002: 55) pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar yang kemudian diikuti dengan pendapatan yang lain. Sebagaimana yang tertera dalam UU No. 32 Tahun 2004 Juncto tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut, Kabupaten Bone melaksanakan otonomi daerah yang terlepas dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan beberapa urusan, baik dari sumber daya aparatur, kemampuan pendanaan, kelembagaan dan organisasi serta dukungan kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Selain itu, secara nasional maka

pemerintah daerah melaksanakan pula urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya disparatis dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi yang ada di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan adanya penyelenggaraan keuangan yang memadai di daerah tersebut akan memperbaiki kekeliruan selama ini sehingga di daerah terdapat peluang untuk mendapatkan dana yang lebih besar serta kebebasan dalam mengelola daerahnya sendiri (Pamuji, 2014). Brueckener and kim's (2003) menyatakan bahwa daerah memiliki kebebasan dalam mengatur segala peralatan atau *property* yang ada dalam daerah tersebut.

Huizinga and Nielsen (2000) menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menunjukkan segala potensi yang ada dalam daerah serta pemerintah daerah menjadi figur dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Secara teoretis, pemerintah daerah merupakan unsur pemerintah terdesentralisasi atau serentetan barang publik yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan berbagai kebijakan pembangunan pada level subnasional. Pada tataran praktis era desentralisasi, tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dan kebijakan pembangunan daerah semakin dinamis meskipun problema kapasitas kemampuan manajerial pemerintah daerah selalu membayang-bayangi. Ketika kurang optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah terjadi di era desentralisasi, maka dapat diperkirakan bahwa ada

problema serius dalam kinerja manajerial keuangan daerah yang diselenggarakan. Peranan strategis barang publik membuat adanya kemungkinan terbentuknya hambatan alokasi barang publik maupun penyediaan pelayanan publik di daerah.

Masalah pajak masih terus terjadi hingga saat ini dikarenakan rendahnya kemauan masyarakat wajib pajak dan badan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak. Permasalahan lain pun timbul, tatkala seorang wajib pajak juga terikat dengan kewajiban zakat. Tak jarang hal ini menimbulkan perdebatan panjang yang berujung kelesuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban terhadap Negara. Pajak dan zakat pun terus diperbandingkan dan dikaji banyak pihak, sebagian menyatakan pajak dan zakat harus dilaksanakan karena menyangkut kewajiban terhadap negara dan agama.

Pihak lain menyatakan pajak saja sudah cukup, kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar pajak memang tak lantas bisa diubah dengan aturan-aturan yang ditetapkan direktorat jendral pajak. Perlu pemahaman dan tindakan solutif yang tidak memberatkan wajib pajak maupun pemerintah sebagai pihak yang hidup dengan pajak yang dibayarkan masyarakat. Menarik ketika kita memasukkan unsur zakat sebagai umpan penyemangat wajib pajak karena umumnya masyarakat lebih nyaman menjalankan kewajiban agama dibandingkan aturan negara. Menilik presentasi kaum muslimin di Indonesia yang sangat besar, meroposisi kesadaran wajib pajak lewat wajib zakat sangat memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi banyak masyarakat awam yang sering salah paham dan merasa dirugikan akibat

kewajiban ganda membayar pajak dan zakat (*Kompas*, 11 September 2017). Sehingga dalam hal ini ayat yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu QS. At-Taubah/9: 29 sebagai berikut:

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka).”(QS. At-Taubah/9:29) (Kementrian Agama RI, 2015)

Dari ayat tersebut ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa jizyah itu dipungut kecuali dari orang-orang Ahli Kitab dan semisalnya seperti orang-orang majusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis: “Bahwasannya Rasulullah memungut jizyah dari orang-orang Majusi Hajar.” Pendapat ini dianut oleh imam asy-syafi’i dan imam Ahmad dalam riwayatnya yang masyhur. Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran Negara Islam.

Sesuai dengan ketentuan umum pada UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi No. 28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan

mengelola sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Otonomi Daerah memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk berinisiatif mengatur dan memaksimalkan sumber daya daerah, hal itu menjadi dasar daerah untuk bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Otonomi daerah dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi rakyat hal ini diakibatkan karena adanya harapan baru untuk memperoleh kebijakan daerah demi memperjuangkan nasib rakyat. Sehingga penyelenggaraan keuangan yang menyeluruh sangat diperlukan sebab akan lebih mudah mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang telah diatur Undang-undang. Keuntungan dapat lebih giat lagi untuk melakukan pembenahan dan pembangunan fasilitas umum dari hasil pemungutan pajak daerahnya. Namun pelaksanaan pembangunan daerah sering terkendala keterbatasan dana akibat pemberlakuan UU Otonomi Daerah untuk aktif menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan meminimalkan ketergantungan bantuan pusat (Hoque, 2008).

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan keuangan adalah tingkat kesiapan keuangan yang berbeda pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang menguntungkan daerah-daerah yang mempunyai sumber daya potensial namun bagi daerah yang kurang memiliki sumber daya potensial menganggap kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang tidak menguntungkan (Norregaard, 2013). Penelitian Pepinsky (2008) dan Aragon (2009) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memperoleh dana paling besar dari pajak daerah dan pemerintah pusat.

Setiap daerah memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi. Sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan mampu berkontribusi lebih signifikan. Dalam penerimaan pendapatan asli daerah dengan tujuan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah yang pada tujuannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah (Paulson, 2008). Sehingga daerah menjadi lebih leluasa melakukan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat disamping itu juga menambah pundi-pundi pendapatan daerah tersebut.

Kabupaten Bone merupakan suatu daerah yang menyelenggarakan dan melakukan pembangunan yang membutuhkan dana yang besar, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Bone perlu memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Pendapatan daerah yang kebanyakan dari pajak daerah itu sendiri yang mana pajak daerah tersebut berfungsi untuk lebih meningkatkan sistem dan mekanisme pembangunan daerah. Dan apabila adanya pembangunan daerah atau pembaharuan fasilitas-fasilitas umum tiap daerah dapat menggunakan dana yang berasal dari pungutan pajak daerahnya masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapat daerah yang berasal dari pajak daerah dan pemungutannya sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Dana dari pajak daerah selalu diawasi agar dapat terealisasi tepat pada sasaran karena pendapatan dari pajak daerah merupakan pendapatan yang terbesar daerah. Sebagaimana yang dikatakan Murphy (2002) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembangunan

perlu melakukan suatu perencanaan keuangan dalam mewujudkan pembangunan dan hal tersebut bisa tercapai ketika penerimaan pajak yang memadai.

Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan (Bardhan, 2002). Otonomi daerah adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah atas hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahnya sesuai dengan ketentuan umum di UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Daerah Otonomi merupakan kesatuan hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai gagasan berdasarkan dukungan masyarakat. Penerapan otonomi daerah bertujuan mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat di daerah untuk memicu potensi daerah demi peningkatan perekonomian daerah. Black and Hoyt (1989) menyatakan pula bahwa suatu daerah akan menunjukkan kualitas dari suatu daerah dengan menunjukkan penerimaan pajak serta pemerintah yang mampu mengatur daerah itu sendiri dengan baik.

Eksistensi suatu daerah mampu dilihat dari seberapa baik pembangunan dalam daerah tersebut dan hal ini akan tercapai jika komitmen dalam organisasi mampu diterapkan dalam daerah tersebut. Adanya komitmen organisasi yang tinggi maka hal ini mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Selain mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Komitmen yang tinggi dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan

pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik sesuai dengan yang diharapkan (Haaparanta, 1996). Pelaksanaan komitmen organisasi dalam hal pelaksanaan pengelolaan pajak daerah merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana dikatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah Indonesia disamping sektor migas. Menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Brenann (1980) menyatakan bahwa hal tersebut tergantung pada respon wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini apabila komitmen organisasi itu rendah maka akan membuat individu berbuat untuk kepentingan pribadinya dalam mengelola pajak daerah. Sehingga dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja aparatur (Sari, dkk (2014:3)).

Dengan demikian komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pajak daerah dapat diciptakan melalui kesamaan visi dan misi antar individu dalam suatu organisasi yang ditentukan oleh perilaku individu. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada Pemda Kabupaten Bone)”**.

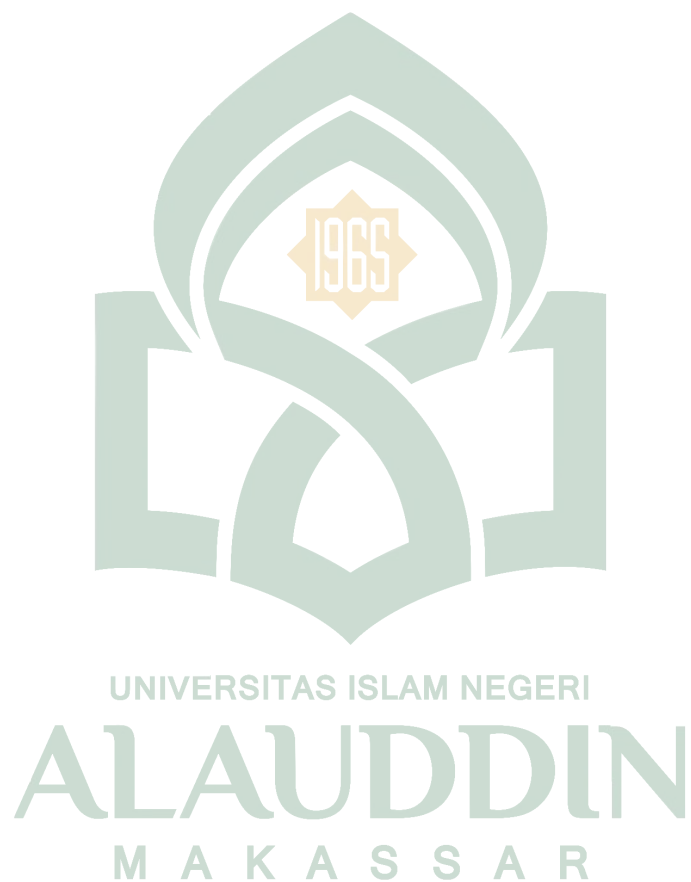
B. Fokus penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan pajak daerah dan penyelenggaraan keuangan pemerintah dengan menggunakan perspektif komitmen organisasi. Pengelolaan pajak yang sering menjadi perhatian publik dan menjadi bahan acuan untuk kemajuan suatu daerah. Pengelolaan pajak yang seharusnya disesuaikan dengan aturan yang ada dalam daerah masing-masing akan tetapi sampai sejauh ini pengelolaan pajak yang ada di Kabupaten Bone belum sepenuhnya mematuhi aturan tersebut dikarenakan adanya pembayaran berganda bagi umat Islam. Komitmen menjadi suatu pedoman penting dimana setiap keputusan organisasi harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan keputusan yang diberlakukan. Komitmen adalah lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan individu sehingga pemerintah dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada komitmen organisasi sehingga dalam masyarakat dapat tercapai dan kinerja dari pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa pajak daerah dalam perspektif komitmen organisasi menjadi penentu keberlangsungan pembangunan daerah dimana hal tersebut oleh peran dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga pembangunan daerah bisa terlaksana serta pelayanan yang baik bagi masyarakat. Maka dari itu dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana perspektif komitmen organisasi terhadap kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone?



D. Penelitian Terdahulu

NAMA PENELIT I	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Pamuji, 2014	Kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah (analisa terhadap implementasi wewenang pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah)	Kebijakan pengelolaan pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah pusat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pengawasan preventif dan represif dan adanya keharusan bagi daerah untuk mengimplementasikan wewenang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat mengindikasikan pengelolaan pajak daerah belum menunjukkan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya.
Halim, 2012	Pengaruh komitmen organisasi dan peranan kepemimpinan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Kabupaten Banggai Kepulauan	Komitmen organisasi memiliki kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah dan peranan pimpinan juga berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Baihaqi, 2013	Pengaruh komitmen organisasi dan peran manajerial pengelolaan keuangan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah	Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah
Muchidin, 2014	Pengaruh pelaksanaan kebijakan pajak daerah terhadap efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah Di Kabupaten Sumedang	Pelaksanaan kebijakan daerah terhadap efektivitas pengelolaan PAD berpengaruh positif terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui perspektif komitmen organisasi terhadap kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah Di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Peneliian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Teoretis

Penelitian ini menjelaskan *stewardship theory* yang dikemukakan oleh Raharjo (2012) yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesesuaian organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan organisasi publik yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dengan *principals*.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan pemerintah dalam berkinerja. Disamping itu, penelitian ini memberikan gambaran tentang berbagai kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk keberlangsungan aktivitas suatu daerah. Penelitian ini juga diharapkan pula agar pemerintah dalam melaksanakan kinerja memiliki komitmen yang tinggi

dalam mewujudkan tujuan yang sebenarnya dari kebijakan yang dibuatnya serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan golongan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Stewardship Theory

Grand theory yang mendasari tulisan ini adalah bagian dari *Agency Theory* yaitu *stewardship Theory* (Donaldson et al, 1991) dengan judul “*Toward Astewardship Theory Of Management*”. *Stewardship theory* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih dirujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2012). Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesesuaian organisasi. *Stewardship theory* dapat diterapkan organisasi publik yang sejak awal perkembangannya. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. *Stewardship theory* sering disebut sebagai pengelolaan (penata layanan) dengan beberapa asumsi-asumsi dasar (*fundamental of stewardship theory*) ditunjukkan dalam tabel berikut:

Asumsi Dasar Teori Stewardship

<i>Manager as</i>	<i>Stewardship</i>
<i>Approach To Governance</i>	<i>Sociological and Physicological</i>
<i>Model Of Human Behavior</i>	<i>Collectivistic, Pro-Organizational trustworthy</i>
<i>Manager Motivied by</i>	<i>Principals objectivies</i>
<i>Manager-Principal Interest</i>	<i>Covergence</i>
<i>Structures That</i>	<i>Facilitate and Empower</i>
<i>Owners Attitude</i>	<i>Risk-Propensity</i>

Sumber: (Podrug N, 2011:406)

Menurut Podrug (2011) beberapa pertimbangan penggunaan *stewardship theory* adalah:

1. Manajemen sebagai *steward* (Pelayanan /penerimaan amanah/pengelola)

Stewardship theory memandang bahwa pemerintahan sebagai penata layanan akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah yang bertindak sebagai *steward*, penerima amanah menyajikan informasi keuangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

2. Pendekatan *governance* menggunakan sosiologi dan psikologi

Stewardship theory menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* untuk dapat bertindak sesuai dengan keinginan principal dan organisasi.

3. Model manusia, berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi

Model *of human* pada *stewardship theory* didasarkan pada *steward* (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok bekerjasama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani.

4. Motivasi pimpinan sejalan dengan tujuan principal

Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi para pemimpin tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga *steward* sesuai dengan keinginan principal.

5. Kepentingan manajer-principal adalah konvergensi

Stewardship theory mengasumsikan bahwa kepentingannya legislatif dan principal adalah konvergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi.

6. Struktur berupa fasilitas dan pemberdayaan.

Stewardship theory menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan.

7. Sikap pemilik mempertimbangkan resiko

Stewardship theory cenderung mempertimbangkan resiko. Tulisan ini memaparkan nilai kebudayaan yang harus dipegang teguh oleh *steward* dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi untuk dapat menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.

8. Hubungan principal-manajemen saling percaya

Stewardship theory dibangun atas filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Implikasi *stewardship theory* terhadap tulisan ini, dapat dijelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah diamanahkan sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

B. Teori Harapan

Teori motivasi yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap falsafah manajemen kinerja adalah yang berkenaan dengan tujuan (*Goal*), dorongan (*Reinforcement*) dan harapan (*Expectancy*) (Dharma, (2005:245). Harapan yang dimaksudkan pemerintah daerah juga memberikan yang terbaik terhadap kebijakan tersebut demi meningkatkan penerimaan pajak serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Teori harapan memiliki dua aspek baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Aspek untuk pemerintah dimana dalam menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan diharapkan perlunya adanya komitmen dalam diri pemerintah serta tetap dalam rencana yang telah disepakati yaitu kesejahteraan masyarakat. Aspek untuk masyarakat diharapkan masyarakat dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selaku masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu kemajuan untuk daerah itu sendiri sehingga ada dorongan untuk membayar pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Masyarakat juga disini dihimbau untuk sesadar mungkin pentingnya suatu pembangunan dan keberlanjutan segala aktivitas dalam daerah itu sendiri.

Kesejahteraan masyarakat akan banyak bergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah, dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini

berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah yang menyebutkan:

“Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab”.

Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektifitas dan efesiensi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas penghasilan asli daerah (PAD).

Efektifitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Maka efektifitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu sedangkan efesiensi menurut Halim (2004) merupakan pengukur besar biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri. Pengukuran efektifitas dan efesiensi

pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah.

C. Teori Bakti

Teori ini dikemukakan oleh Resmi (2009:6) teori ini mengutamakan kepentingan suatu daerah yang merupakan suatu kesatuan dan individu-individu dimana setiap masyarakat terikat oleh pemerintahnya. Sehingga daerah memiliki hak atas masyarakat secara mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat sebaliknya masyarakat harus sadar membayar pajak sebagai kewajiban aslinya dan sebagai tanda baktinya kepada daerah dan negara.

Masyarakat yang selaku wajib pajak yang sudah semestinya untuk memperhatikan hal tersebut dimana untuk memberikan perbaikan terhadap keberlangsungan daerah. Pemerintah yang menjadi fitur dalam masyarakat yang seharusnya mampu memberikan hukuman bagi para wajib pajak yang telah melanggar suatu kebijakan dalam perpajakan sehingga pembangunan suatu daerah dapat tercapai serta kesejahteraan masyarakat mampu ditingkatkan. Masyarakat dan pemerintah merupakan suatu kesatuan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang baik berkelanjutan sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu menjadi partner yang baik untuk mewujudkan hal tersebut.

Organisasi pelaksana pajak dalam hal ini pemerintah daerah yang seharusnya mampu memberikan contoh bagi masyarakat sehingga tidak terjadi penunggakan dalam pembayaran pajak daerahnya. Pemerintah masyarakat tidak bisa terlepas salah satunya dalam tatanan pemerintah dan oleh sebab itu sepatutnya pemerintah dan

masyarakat menjalin kerjasama yang baik untuk mewujudkannya. Sehingga pembangunan dan masyarakat menjalin kerjasama yang baik untuk mewujudkannya. Sehingga pembangunan dalam suatu daerah mampu tercapai serta kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat dan kemakmuran yang secara berkelanjutan.

D. Kebijakan Pengelolaan Pajak

Didalam kebijakan dan praktik perpajakan tidaklah lepas dari permasalahan. Permasalahan perpajakan diberbagai negara memperhatikan bahwa pajak justru menjadi salah satu sumber penyebab dari ketimpangan. Kelompok superkaya justru membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat kaya atau menengah dikarenakan pengenaan tarif yang rendah. Bahagijo (2014) dalam pajak kepada superkaya perancis dan pemilu Indonesia 2014 (Analisis INFID No 1) memberikan pemaparan bagaimana orang-orang superkaya masih sangat kecil kontribusinya dalam membayar pajak. Musgrave (1984) memberikan bahwa secara teoretis masalah penting yang selalu timbul dalam implementasi sistem perpajakan adalah keadilan dalam distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat.

Kabupaten/kota menjadi titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini disebabkan karena daerah kabupaten/kota menjadi basis utama otonomi daerah. Menurut Mudjarat (2004) hal ini mendasari daerah kabupaten/kota ini menjadi titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Dari dimensi politik, daerah kabupaten/kota kurang mempunyai *fantisme* kedaerahan sehingga risiko gerakan separatism dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif bisa minim.
2. Dari dimensi administrative, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatis dapat lebih efektif.
3. Daerah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan sehingga daerah kabupaten/kota lebih mengetahui potensi rakyat didaerahnya.

Selain itu memberikan otonomi secara utuh kepada suatu kabupaten/kota akan menuntut kabupaten/kota tersebut untuk dapat memenuhi unsur-unsur mutlak sehingga baru bisa disebut daerah otonom. Menurut Kaho (1991) unsur-unsur mutlak tersebut yaitu:

1. Mempunyai urusan rumah tangga sendiri, maksudnya urusan-urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diatur sendiri.
2. Urusan-urusan tersebut diatur sesuai dengan kebijaksanaannya dan diurus sesuai dengan inisiatif atau prakarsanya sendiri.
3. Urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut diselenggarakan oleh perangkat daerah itu sendiri.
4. Untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri.

Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo

(2002:59) terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan menggunakan Asas Desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah akan membawa kebaikan bagi Negara Indonesia (Kaho, 1991) yaitu:

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang mendesak, perlu membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak menunggu lagi intruksi dari pemerintah.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera terselesaikan.
4. Dalam sistem Desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan bagi kepentingan tertentu.
5. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu organisasi (Erlina, 2008). Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realiasi PAD dengan menggunakan indikator

keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Menurut Abdul dan Muhammad (2012) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya untuk daerah tersebut.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapatkan kendala ketika di implementasikan. Sebaiknya, suatu kebijakan juga harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta perhatian yang lebih terhadap kebijakan itu dikarenakan kebijakan antara private dan swasta memiliki perbedaan yang sangat nyata (Gaffar, 1991:7).

Kebijakan pemerintah daerah sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang melaksanakan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Wibawa (1994) yang menyatakan bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah itu sendiri dan keduanya yaitu kebijakan publik sebagai keputusan pemerintahan yang mempunyai tujuan tertentu.

E. Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah

Kuangan daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Bratakusumah & Solihin (2004:379)). Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Di Kabupaten Bone Penyelenggaraan keuangannya yaitu diberikan dalam bentuk pelayanan seperti pembangunan daerah, otonomi daerah serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi tersebut belum berjalan secara maksimal diakibatkan pendapatan pajak daerah yang kurang serta daerah masih sangat

bergantung pada dana perimbangan dikarenakan penerimaan pajak yang kurang. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Penyelenggaraan pemerintah daerah juga merupakan subsistem dari pemerintahan negara sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan Negara akan mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi (Ahmad, 2004).

F. Komitmen Organisasi

Komitmen dalam organisasi merupakan salah satu kunci penting yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Aktami, 2008). Komitmen organisasi adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi Indarto dan Ayu (Mathiew & Zajac, 2011:35). Menurut Tobing (Porter et al.,

2009:32). Mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif individu terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu yang dicirikan oleh tiga faktor psikologis: (1) keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi organisasi dan (3) kepercayaan yang pasti dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Kepemimpinan sebagai suatu proses dan perilaku untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Komitmen dari seluruh komponen organisasi pemerintah daerah adalah kesepakatan antara kepala satuan kerja perangkat daerah serta seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran sesuai dengan Renstra SKPD. Mowday, Porter, & Steers (1982) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai “ *the relative strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization*”. Definisi ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan yang aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Adapun ayat yang berkaitan dengan hal tersebut QS Al-Fath/48: 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ عَظِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, untuk menolong dengan segala kemampuan sebenarnya mereka berjanji kepada Allah. Barang siapa melanggar janjimu setelah dikokokannya janji itu, maka mudaratnya akan menimpa diri mereka sendiri. Dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah dengan menyempurnakan baiat kepadamu maka Allah akan memberinya pahala yang sangat besar.” (QS. Al-Fath/48: 10. Kementerian agama RI,)

Dari ayat tersebut ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap baiat yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah SAW bahwa hal itu juga berarti mengadakan baiat kepada Allah (Baiat ialah suatu janji setia atau ikrar yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berisi pengakuan untuk menaati seseorang misalnya karena ia diangkat menjadi pemimpin). Dalam ayat ini, diterangkan cara baiat yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah SAW yaitu dengan meletakkan tangan Rasul diatas tangan orang-orang yang berjanji, dalam posisi demikian, diucapkan kata baiat. Maksud kalimat “tangan Allah di atas tangan mereka” ialah untuk menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah SAW sama hukumnya dengan berjanji kepada Allah. Oleh karena itu, ada ahli tafsir yang mengartikan tangan di sini dengan kekuasaan, kemudian diterangkan akibat yang akan dialami orang-orang yang mengingkari perjanjian itu, yaitu mereka akan memikul dosa yang besar. Sebaliknya diterangkan pula pahala yang akan diperoleh

orang-orang yang menepati baiatnya. Mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda di akhirat dan tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan.

Adapun menurut Robbin's and Coulter (2012) mengatakan bahwa “*Organizational Commitment is the degree to which an employee identifies with a particular organization and its goals and wishes to maintain membership in the organization*”. Dengan kata lain, komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana identifikasi karyawan terhadap suatu organisasi dan tujuannya dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi tersebut. Mowday (1982) mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatannya sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu dengan organisasi kerja. Sedangkan Mitchell (1982) memandang komitmen sebagai suatu orientasi nilai terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu sangat memikirkan pekerjaannya dimana pekerjaan memberikan kepuasan dan pekerjaan memberikan status bagi individu. Charles O'Reilly (1989), menyatakan bahwa komitmen organisasi secara umum dipahami sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi termasuk keterlibatan kerja, kesetiaan dan perasaan percaya pada nilai-nilai organisasi.

Komitmen itu sendiri adalah kemauan yang timbul dari dalam diri kita sendiri tanpa adanya dorongan dari pihak lain sehingga komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerjanya harus kuat dimana lebih mementingkan publik daripada kepentingan pribadi. Komitmen dalam suatu kinerja pemerintah menjadi suatu patokan atau panduan bagi pemerintah untuk tetap pada kebijakan yang dibuatnya sehingga kinerjanya sebagai pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kinerja yang tidak di landasi dengan komitmen, hal ini akan menyebabkan banyaknya tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam kebijakan yang dibuatnya sehingga kebijakan yang ditetapkan hanyalah suatu kebijakan hampa tanpa ada keuntungan yang didapatkan oleh daerah dari kebijakan tersebut.

Menurut Sutrisno (2009) Kurangnya komitmen dalam diri dan organisasi akan menimbulkan beberapa penyimpangan seperti penyimpangan yang ditandai dengan menurunnya atau tidak disiplinnya dan semangat kerja yang disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya:

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi, mempengaruhi tegaknya disiplin.
2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan, karena keteladanan kepemimpinan sangat penting dalam lingkungan perusahaan.

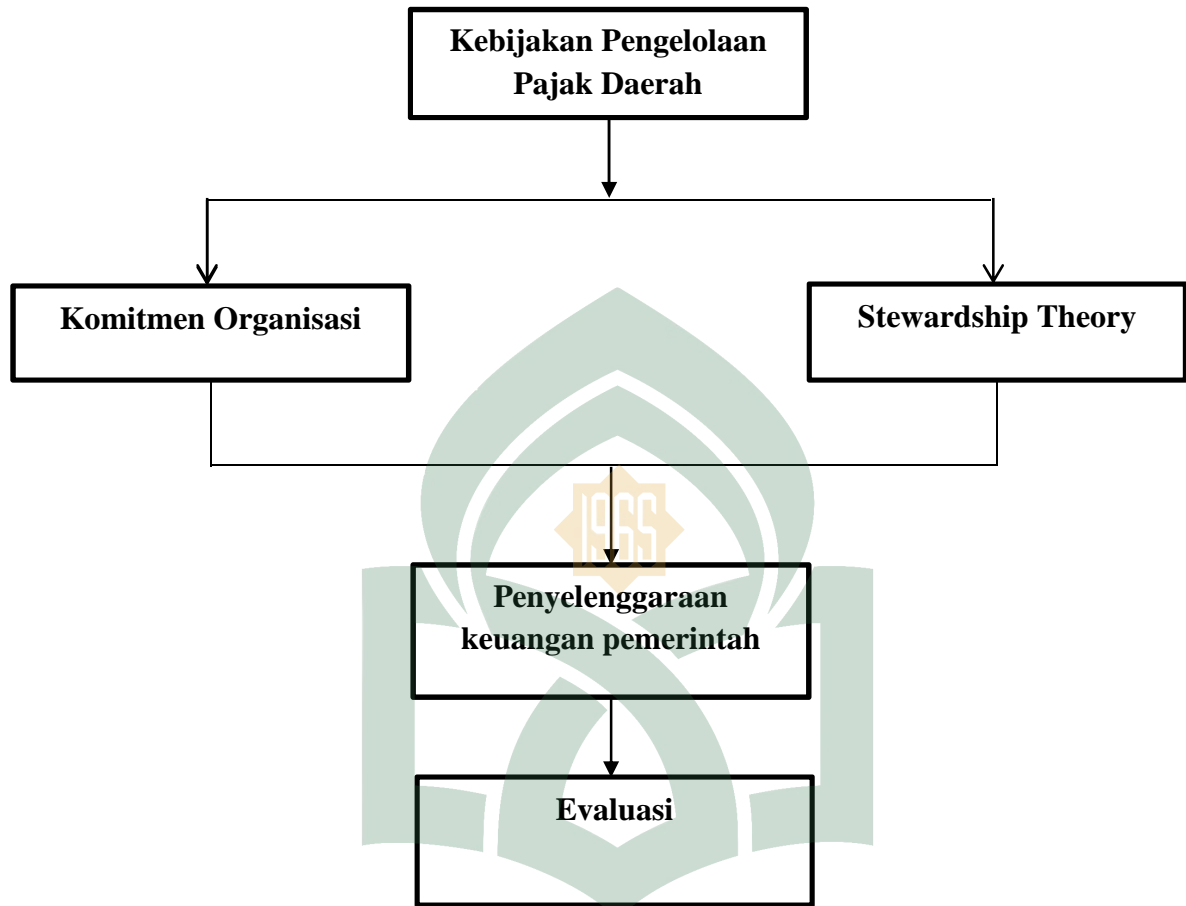
Disamping itu, manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks dan unik serta diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak berdiri sendiri yaitu tubuh (fisik/jasmani) sebagai unsur materi, dan jiwa yang bersifat non materi. Hubungan kerja yang paling intensif dilingkungan organisasi adalah antara pemimpin dengan para pekerja (staf) yang ada di bawahnya. Hubungan kerja semakin penting artinya dalam usaha organisasi mewujudkan eksistensinya dilingkungan tugas yang lebih luas dan kompetitif pada masa yang akan datang. Disumber daya manusia memiliki keinginan harga diri, pikiran, hak asasi, ingin dihormati dan lain-lain. Oleh karena itu sumber daya manusia harus diperlakukan sama secara hati-hati dan penuh kearifan. Sumber daya manusia adalah ujung tombak pelayanan sangat diandalkan untuk

memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh wajib pajak. Untuk mencapai standar mutu tersebut, maka harus diciptakan situasi yang mendukung pelayanan yang memuaskan wajib pajak.

G. Rerangka Konseptual

Tujuan utama dilaksanakannya pengelolaan pajak serta penyelenggaraannya diperlukan adanya komitmen dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan pajak daerah pemerintah daerah perlu memberikan ketegasan dalam melaksanakan hal tersebut sehingga kinerjanya mampu menjadi bahan pertanggungjawaban serta mendapat perhatian dari masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah tersebut. Hal utama dalam pengelolaan pajak daerah dan penyelenggaraannya diperlukan adanya komitmen dalam setiap organisasi untuk dapat terselenggaranya pembangunan daerah tersebut. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan daerah komitmen dari organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi tercapainya dan terselenggaranya pembangunan daerah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang dapat ditarik dalam penelitian ini dapat dirumuskan pada suatu rerangka konseptual seperti pada gambar.

Gambar. 1
Rerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Dimana dalam penelitian kualitatif ditekankan pada proses dan pemaknaan atas realitas sosial yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas ataupun frekuensi. Menurut Moleong (1993) menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk mengetahui lingkup dari subjek penelitian sebagai sumber tempat memperoleh keterangan (fakta).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada suatu lembaga yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Di Jln R. W. Monginsidi Kabupaten Bone.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan instansi secara sistematis, aktual dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nampak dalam organisasi dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data:

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana penjelasan dengan menggunakan kata-kata. Serta diperoleh melalui responden penelitian berupa informan yang diwawancarai. Wawancara dilakukan:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Tifa Armanusa, SH	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan
2	Alimuddin, S. Sos	Sekretaris
3	Syamsuddin	Masyarakat

Sumber data:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.
- b) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari luar data primer yang mendukung dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku literature dan sumber lain yang berhubungan erat dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh mengenai sejarah dan struktur organisasi atau gambaran umum instansi teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan konteks penelitian digunakan teknik pengumpulan data melalui metode menggunakan wawancara dimana dengan menggunakan data dan mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Selain dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan informan untuk mendapatkan data berupa kata-kata dan gambar yang mampu mempercepat proses penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan berupa alat penunjang yang dapat mengukur ataupun menggambarkan fenomena yang diamati. Alat yang dapat digunakan dalam instrument penelitian yaitu :

1. Kamera, dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mengambil gambar atau mendokumentasikan data dalam bentuk gambar untuk diolah dan dianalisis.
2. Handphone, dalam penelitian ini digunakan sebagai perekam suara dalam mewawancarai informan. Peneliti menggunakan alat ini ketika diberi izin dari informan untuk merekam suaranya pada saat wawancara. Alat ini sangat membantu peneliti karena dapat merekam informasi dan informan sehingga peneliti tidak terlalu sulit dalam mengumpulkan data. Dan peneliti juga menggunakan handphone untuk mendownload atau browsing data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti.

3. Peneliti juga menjadi instrument dalam penelitian ini dimana peneliti berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan dalam pelaksanaan kinerja.

F. Metode Analisis

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan dengan cara deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara menjelaskan data-data yang ada dengan memberikan gambaran atau menjabarkan data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan secara sistematis dan diinformasikan kepada orang lain agar bisa dipahami dengan baik.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, untuk menentukan keabsahan data yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode Triangulasi guna menguji kesesuaian antara ucapan dan tindakan informan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Adapun empat teknik yang digunakan menurut Patton dalam Sulistiany (2011) akan tetapi dalam penelitian ini hanya tiga tehnik yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Data

Menggunakan sumber data seperti dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal dan menganalisa data tersebut. Setelah dianalisa, peneliti mengungkap temuan unik menantang serta memberikan pemahaman yang jelas terhadap masalah.

2. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

3. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Bagaimana Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Bone, serta menjelaskan tata cara pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerja pemerintah daerah Di Kabupaten Bone.

A. Hasil Penelitian Di Kabupaten Bone

1. Sejarah Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten Pesisir Timur yang terdapat Di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibu Kota Watampone. Kabupaten Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada Di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memiliki luas keseluruhan mencapai 4.559 KM². Kabupaten Bone secara administratif terbagi menjadi 27 Kecamatan, 329 Desa, dan 44 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 KM² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yaitu seluas 0,52 KM².

Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat Di Provinsi Sulawesi Selatan. Bone dahulu disebut Tanah Bone berdasarkan Lontara bahwa nama asli Bone adalah pasir dalam bahasa bugis dinamakan Bone adalah *Kassi'* (Pasir) dari sinilah asal usul sehingga dinamakan Bone. Kabupaten Bone adalah suatu kerajaan besar Di Sulawesi Selatan yaitu sejak adanya Manurunge Ri Matajang pada awal abad XIV atau pada tahun 1330. Dengan datangnya To

Manurung (Manurunge Ri Matajang) diberi gelar *Mata Silompo'e*. maka terjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut termasuk Cina, Barobbo, Awampone Dan Palakka.

Pada saat pengangkatan *To Manurung Mata Silompo'e* menjadi Raja Bone, terjadilah kontrak pemerintahan berupa sumpah setia antara rakyat Bone dalam hal ini diwakili oleh penguasa Cina dengan 10 *Manurung*, sebagai tanda serta lambang kesetiaan kepada rajanya yang sekaligus merupakan pencerminan corak pemerintahan Kerajaan Bone diawal berdirinya. Disamping penyerahan diri kepada sang raja juga terpatri pengharapan rakyat agar supaya menjadi kewajiban raja untuk menciptakan keamanan, kemakmuran serta terjaminnya penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat. Adapun teks sumpah yang diucapkan oleh penguasa Cina mewakili rakyat Bone berbunyi sebagai berikut:

Angikko kuraukkaju riyaami'ri riakkeng kuttappalireng elomu elorikkeng adammukkua mattappako kilao, maliko kisawe. Millauko ki abbere, modongirikeng temmatippang, muampirikang temmakare', musalimurikeng temmadinging.

Artinya:

“Engkau angin dan kami daun kayu kemana berhembus kesitu kami menurut kemauan dan kata-katamu yang jadi dan berlaku atas kami, apabila engkau mengundang kami menyambut dan apabila engkau meminta kami memberi, walaupun anak istri kami jika tuanku tidak senangi kamipun tidak menyenangnya, tetapi engkau menjaga kami agar tentram, engkau berlaku adil melindungi agar kami makmur dan sejahtera engkau selimuti kami agar tidak kedinginan.”

Budaya masyarakat Bone demikian tinggi mengenai sistem norma atau adat berdasarkan lima unsur pokok masing-masing: *Ade, Bicara, Rapang, Wari* dan *Sara* yang terjalin satu sama lain, sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat yang memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing.

Kesemuanya itu terkandung dalam suatu konsep yang disebut “ *SIRI*” merupakan integral dari kelima unsur pokok tersebut diatas yakni *Pangngadereng* (norma adat), untuk mewujudkan nilai Pangadereng maka rakyat Bone memiliki sekaligus mengamalkan semangat/budaya;

Sipakatau : Artinya saling memanusiakan, menghormati/menghargai harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai makhluk ciptaan Allah tanpa membedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap norma adat/hukum yang berlaku.

Sipakalebbi: Artinya saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa berperilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Sipakainge: Artinya saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat, pendapat orang lain, menerima kritikan dan saran positif dan siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan.

Dengan berpegang dan berpijak pada nilai budaya tersebut diatas, maka sistem pemerintahan Kerajaan Bone adalah berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini dibuktikan dimana waktu itu kedudukan ketujuh ketua kaum (*Matoa Anang*) dalam satu majelis dimana *Manurung-E* sebagai ketuanya. Ketujuh kaum itu diikat dalam satu ikatan persekutuan yang disebut *Kawerang*, artinya persekutuan Tanah Bone. sistem *Kawerang* ini berlangsung sejak *Manurung* sebagai Raja Bone pertama hingga Raja Bone ke IX yaitu *Lapatauwe Matinroe Ri Bettung* pada akhir abad ke XVI.

Pada tahun 1605 agama islam masuk di Kerajaan Bone dimasa pemerintahan Raja Bone ke X *Latenri Tuppu Matinroe Ri Sidenreng*. Pada zaman itu pula sebutan *Matoa Pitu* diubah menjadi *Ade' Pitu* (Adat Tujuh), sekaligus sebutan *Matoa* mengalami pula perubahan menjadi Arung misalnya *Matoa Ujung* disebut *Arung Ujung* dan seterusnya. Demikian perjalanan panjang Kerajaan Bone maka pada bulan mei 1950 untuk pertama kalinya selama Kerajaan Bone terbentuk dan berdiri awal abad ke XIV atau tahun 1330 hingga memasuki masa kemerdekaan terjadi suatu demonstrasi rakyat di kota Watampone yaitu menuntut dibubarkannya Negara Indonesia Timur, serta dihapuskannya pemerintahan kerajaan dan menyatakan berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia.

Beberapa hari kemudian para anggota adat tujuh mengajukan permohonan berhenti. Disusul pula beberapa tahun kemudian terjadi perubahan nama distrik/onder distrik menjadi kecamatan sebagaimana berlaku saat ini. Pada tanggal 6 april 1330 melalui rumusan hasil seminar yang diadakan pada tahun 1989 Di Watampone dengan diperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bone Nomor 1 Tahun 1990 Seri c, maka ditetapkanlah tanggal 6 april 1330 sebagai hari jadi Kabupaten Bone dan diperingati setiap tahun.

Kabupaten Bone termasuk suku terbesar ketiga di Indonesia setelah suku Jawa dan Sunda. Berasal dari Sulawesi Selatan dan menyebar pula Di Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Menurut sejarah, Kabupaten yang ada sekarang berawal dari masa kejayaan Kerajaan Bone yang dulu sangat terkenal dinusantara. Bersama Kerajaan Gowa Tallo, Kerajaan

Bone turut mewarnai sejarah panjang ada lagi kerajaan lain seperti Kerajaan Soppeng, Wajo, dan siang yang termasuk dalam etnis bugis.

2. Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Bone terletak antara $4^{\circ}13' - 5^{\circ}6'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}42' - 120^{\circ}40'$ Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng disebelah Utara, Teluk Bone disebelah Timur, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa disebelah Selatan, dan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Barru diselah Barat.

3. Batas Wilayah

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
- c) Sebelah Timur : Teluk Bone
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru

4. Luas wilayah

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 KM^2 .

Tabel 4.1
Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bone

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Bontocani	463,35
2	Kahu	189,50
3	Kajuara	124,13
4	Salamekko	84,91
5	Tonra	200,32
6	Patimpeng	130,47
7	Libureng	344,25
8	Mare	263,50
9	Sibulue	155,80
10	Cina	147,50
11	Barebbo	114,20
12	Ponre	293,00
13	Lappariaja	138,00
14	Lamuru	208,00
15	Tellu Limpoe	318,10
16	Bengo	164,00
17	Ulaweng	161,67
18	Palakka	115,32
19	Awangpone	110,70
20	Tellu Siattinge	159,30
21	Amali	119,13
22	Ajangale	139,00
23	Dua Beccoe	144,90
24	Cenrana	143,60
25	Tanete Riattang Barat	53,68
26	Tanete Riattang	23,79
27	Tanete Riattang Timur	48,88

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka (BPS, 2017)

5. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Bone terdiri dari 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 kelurahan.

6. Kondisi Sosial dan Budaya

Ketenagakerjaan dan Agama

Penduduk usia Kerja dapat didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun keatas, penduduk tersebut terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Masyarakat Kabupaten Bone pada dasarnya merupakan masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya. Kabupaten Bone merupakan daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan kebanyakan berasal dari etnis Bugis yang masih mempertahankan Tradisi, adat, dan keakraban. Sejalan dengan hal tersebut maka tempat peribadatan bagi penganut agama islam terlihat jauh lebih banyak dari agama lain, sampai akhir tahun 2017 jumlah masjid sebanyak 1.455 unit, Musollah 9 unit sehingga jumlah tempat ibadah muslim sebanyak 1464 unit. Sementara tempat ibadah kaum nasrani tercatat 8 unit gereja.

7. Sarana dan Prasarana

a. Pendidikan

Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan. Tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, menjadikan pendidikan murah, bermutu dan berdaya saing tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab masyarakat pemerintah secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal.

Pendidikan memiliki fungsi strategis dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebaikan serta budi pekerti luhur sejak awal. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Bone relatif cukup berkembang. Pendidikan di Kabupaten Bone yang cukup berkembang membuat Kabupaten Bone lebih maju dalam dunia pendidikan serta dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suatu pendidikan dalam kehidupan sehari-hari baik berbangsa dan bernegara.

Kualitas pendidikan yang berkualitas menjadi harapan masyarakat selain itu juga harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui berbagai indikator seperti angka kelulusan, rasio guru terhadap murid dan kualitas. Dalam penelitian ini pelayanan pendidikan di Kabupaten Bone cukup berkembang dan memadai sehingga mampu memberikan wawasan yang baru bagi penuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kesehatan

Sumber daya kesehatan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya kesehatan yang diperlukan dalam pembangunan kesehatan yaitu tenaga, dana, sarana dan prasarana serta teknologi.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone masih memerlukan beberapa tenaga medis untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan

yang belum memadai diharapkan pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga angka kematiannya lebih sedikit. Pelayanan kesehatan yang baik untuk akan memberikan kesehatan yang baik pula bagi masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone yang masih kurang memadai atau masih membutuhkan berbagai ahli medis dalam menangani kasus yang menimpa pasien. Hal ini menjadi suatu perhatian yang penting bagi pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih memperhatikan masyarakatnya dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat yang sehat akan memberikan sumbangsi yang baik bagi pemerintah Kabupaten Bone maka selayaknya pula pemerintah Kabupaten Bone memperhatikan kesehatan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sesuai yang dikatakan Bapak Syamsuddin selaku masyarakat mengatakan:

“Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bone masih belum memberikan kinerja yang maksimal, baik dalam penerapan kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan daerah sehingga pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan masih kurang merata serta angka pengangguran masih tinggi untuk Kabupaten Bone”. (Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bone masih belum memberikan kinerjanya dalam kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan pemerintah secara efektif sehingga memberikan dampak kepada pendidikan, kesehatan dan pembangunan yang tidak merata. Pemerintah daerah harus lebih memfokuskan kesejahteraan rakyat serta ketegasan dalam menetapkan suatu kebijakan sehingga mampu memberikan yang

terbaik bagi daerahnya sendiri. Adanya fenomena ini sehingga ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kedepannya sehingga masyarakat dan pemerintah mampu menjadi mitra yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada dalam daerah itu sendiri.

c. Pekerjaan Umum

Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Bone selama 5 Tahun terakhir mengalami perkembangan yang baik. Kondisi jalan rusak berat masih tinggi, dimana pada tahun 2013-2017 kondisi jalan rusak berat sepanjang 799,917 Km. sementara untuk kondisi jembatan di Kabupaten Bone Tahun 2013-2017 sepanjang 1050,2 m dalam kondisi baik, 20,5 m dalam kondisi sedang, 108 m dalam kondisi rusak ringan dan sepanjang 288,7 m dalam kondisi rusak berat.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2013 masih ada sekitar 39,70 % panjang ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat dan 20,81 % kondisi rusak ringan. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar mampu menuntaskan persoalan fisik dan prasarana yang menjadi salah satu kendala pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone. Perbaikan jalan dan jembatan perlu diperhatikan oleh pemerintah supaya transportasi menjadi lancar dan mampu memacu pertumbuhan daerah.

Jalan dan jembatan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat dikarenakan hal yang pertama dirasakan masyarakat adalah jalan dan jembatan sebagai jalur transportasi. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak akan memberikan gambaran bagi pemerintah bahwa kepedulian pemerintah terhadap masyarakat masih kurang

maksimal dan hal ini menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak akan memberikan pandangan yang buruk kepada pemerintah baik itu dari masyarakat setempat maupun masyarakat yang melintasi jalan tersebut yang menyebabkan pandangan bagi pemerintah menjadi buruk.

8. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Bone

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Bone melaksanakan sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan 34 urusan tersebut, baik dari sumber daya aparatur, kemampuan pendanaan, kelembagaan dan organisasi serta dukungan kalangan dunia usaha dan swadaya masyarakat. Selain itu, secara nasional maka pemerintah daerah melaksanakan pula urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Penyelenggaraan 34 urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan (LKP dan AMJ) dan informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) sebagaimana diatur dalam PP No. 3 tahun 2007

tentang Pedoman Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengatur tingkat keberhasilan tata kelola pemerintah di Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya

Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bone terkendala pada kapasitas SDM dan tidak adanya data potensi SDA yang bersifat kewilayahan sehingga mengurangi nilai dan produktivitas SDA terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b. Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat belum dilakukan secara berkala (tidak ada data riil) untuk meningkatkan transparansi dan kinerja pelayanan publik. Organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Bone memiliki Luas Wilayah mencapai 4.559 km². Wilayah yang demikian luas itu, secara administrative terbagi ke dalam 27 Kecamatan, 372 Desa/Kelurahan dengan dihuni oleh penduduk sebanyak 728.737 jiwa. Kondisi wilayah pemerintahan yang demikian mengindikasikan rentang kendali pemerintahan yang panjang, sistem dan prosedur yang rumit dan berbelit, serta masih menjauhkan masyarakat dari sentuhan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, utamanya di sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan sentuhan

pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang efektif, diperlukan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

c. *Human Development Index (Index Pembangunan Manusia)*

Tantangan Pemerintah Kabupaten Bone 5 tahun ke depan adalah mengkaselerasi pertumbuhan pencapaian IPM agar target capainya dapat diwujudkan. Capaian IPM dari tahun ke tahun belum menggembirakan dibandingkan dengan capaian beberapa kabupaten tetangga, provinsi ataupun capaian nasional. Beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi kondisi tersebut, salah satu diantaranya adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah serta tingginya angka buta aksara di Kabupaten Bone terutama usia yang tidak produktif lagi. Lebih jelasnya capaian IMP Bone terhadap Provinsi dan nasional. Salah satu bukti nyata capaian IPM Bone yang berkurang memuaskan adalah IPM Kabupaten Bone Peringkat ke 17 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

d. *Partisipasi Masyarakat*

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan rakyat terhadap kinerja pemerintah yang pro poor, pro job, dan pro growth.

e. *Transparansi dan Akuntabilitas*

Opini BPK RI terhadap pengelolaan Keuangan daerah tahun 2017 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

f. *Angka Kesempatan Kerja*

Masalah ketenakerjaan saat ini semakin kompleks dan multidimensional dimana pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih cukup tinggi,

sedangkan pada sisi lain perluasan kesempatan kerja belum memadai, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran hal ini merupakan penghambat program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar dan lapangan kerja sangat terbatas.

Tabel 4.2
Nama-Nama Bupati Kabupaten Bone
(Sejak tahun 1951 sampai sekarang)

NO	Nama Bupati	Periode
1.	Abdul Rachman Daeng Mangung	1951
2	Andi Pangerang Daeng Rani	1951 – 1955
3	Ma'mun Daeng mattiro	1955 – 1957
4	H. Andi Mappanyukki	1957 – 1960
5	Andi Suradi	1960 – 1966
	Andi Djamuddin (Pejabat)	1966 – 1966
	Andi Tjatjo (Pelaksana Tugas)	1966 – 1967
6	Andi Baso Amir	1967 – 1969
7	H. Suaib	1969 – 1976
8	H. P. B. Harahap	1976 – 1982
	H. Andi Madeali (Pejabat)	1982 – 1983
9	Andi Syamsu Alam	1983 – 1988
10	Andi Syamsu Alam	1988 – 1993
11	Andi Muhammad Amir	1993 – 2003
12	H. Andi M. Idris Galigo	2003 – 2008
13	H. Andi M. Idris Galigo	2008 – 2013
14	Dr.H.Andi Fashar Mahdin Padjalangi M Si.	2013 sampai sekarang

(Sumber : Wikipedia, Org)

(a) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bone

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Bone RPJMD tahun 2013-2018 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Visi ini memiliki makna sebagai berikut:

- a) “Sehat” mengandung makna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
- b) “Cerdas” mengandung makna terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
- c) “Sejahtera” mengandung makna masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Bone RPJMD tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
- b) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan local untuk mewujudkan manusia sendiri.
- c) Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan
- e) Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat
- f) Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

(b) Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap dalam perancangan suatu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hal ini mengingat bahwa pemerintah harus menyusun visi-misi sehingga dalam melaksanakan berbagai kebijakan dalam pemerintahan tidak mengalami kesulitan. Adanya penetapan tujuan dan sasaran akan membuat pemerintah semakin mudah dalam menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan keuangan daerah.

Sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah sepatutnya tujuan dan sasaran memang harus perlu untuk diadakan sehingga dalam pelaksanaannya tidak keluar dari visi-misi yang telah dibuat sebelumnya. Pengembangan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah sangat diharapkan kesesuaiannya dengan apa yang telah disusun dalam visi-misinya. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi-misi pemerintah daerah menjadi landasan perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran dalam periode 5 (Periode) Tahun.

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013-2018). Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2013-2018 dikelompokkan dalam setiap misi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Misi “Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan merata”.
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
 - 2) Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
 - 3) Mengurangi kematian ibu, bayi dan balita serta memperbaiki status gizi masyarakat.

4) Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi masyarakat

5) Mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk.

b) Misi “Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan local untuk mewujudkan manusia mandiri”.

1) Meningkatkan akses, kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera.

2) Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat.

3) Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan.

c) Misi “Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan”.

1) Meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM, perdagangan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran.

2) Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

3) Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

d) Misi Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan, dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlindungan sosial.
 - 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- e) Misi Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan apresiasi seni dan budaya di kalangan lembaga pendidikan dan masyarakat.
- f) Misi menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN, dengan tujuan:
- 1) Meningkatkan partisipasi politik dan kondusifitas lingkungan masyarakat.
 - 2) Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif dan akuntabel.
 - 3) Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung data statistik.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diinformasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Adapun sasaran pembangunan Jangka menengah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Misi pertama meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan merata dengan tujuan yang telah ditetapkan pada misi pertama selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang merata
 - 2) Tersebarnya tenaga medis terlatih dan *responsive gender*
 - 3) Terjalinnya hubungan sinergis antar penyedia layanan kesehatan
 - 4) Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan marginal.
- b) Meningkatkan pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular, dengan sasaran;
 - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - 2) Berkurangnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit.
- c) Mengurangi kematian ibu, bayi dan balita serta memperbaiki status gizi masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) Berkurangnya angka kematian bayi dan balita.
 - 2) Meningkatkan status gizi masyarakat.
- d) Meningkatkan cakupan air bersih dan sanitasi masyarakat, dengan sasaran meningkatkan cakupan rumah tangga memiliki sarana air bersih dan sanitasi.
- e) Mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif.
 - 2) Meningkatnya kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi.

Misi kedua meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri

dengan tujuan yang telah ditetapkan pada misi kedua yang dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

a) Meningkatkan akses, kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera, dengan sasaran:

1) Meningkatnya akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang makin setara dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

2) Meningkatkan kualitas pendidikan yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya.

b) Meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan dan jumlah kunjungan ke perpustakaan.

c) Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, dengan sasaran meningkatkan prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda, serta jiwa kewirausahaan pemuda.

Misi ketiga mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan dengan tujuan yang telah ditetapkan pada misi tiga yang dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

a) Meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM, perdagangan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran, dengan sasaran:

1) Meningkatnya realisasi investasi daerah berskala nasional.

2) Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja.

- 3) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai obyek wisata daerah.
 - 4) Meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang berkembang dan bertambahnya jumlah wirausahawan baru.
 - 5) Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat.
 - 6) Meningkatnya jumlah IKM yng berkembang yang jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - 7) Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri.
- b) Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk mewujudkan ketahanan pangan, dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan.
 - 2) Meningkatnya populasi ternak dan hasil ikutannya.
 - 3) Meningkatnya produksi, mutu, dan nilai jual hasil perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan ikan.
 - 4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman.
- c) Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian hutan dan lingkungan hidup, dengan sasaran:
- 1) Terwujudnya perlindungan lahan-lahan produktif sebagai cadangan pangan dan pendukung ekonomi lokal.

- 2) Meningkatnya tertib administrasi pertahanan dan terselesaikannya konflik-konflik pertanahan.
 - 3) Berkurangnya hutan dan lahan kritis, serta bertambahnya luas hutan rakyat.
 - 4) Berkurangnya kasus-kasus pencemaran air, tanah dan udara dan terjaganya kelestarian sumber-sumber mata air.
 - 5) Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.
 - 6) Berkurangnya penambangan tanpa ijin, meningkatnya rumah tangga berlistrik dan meningkatnya pemanfaatan energi alternatif.
- d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, dengan sasaran:
- 1) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan berkondisi baik.
 - 2) Meningkatnya luas dan tingkat pelayanan jaringan irigasi.
 - 3) Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri.
 - 4) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
 - 5) Berkurangnya kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan keluarga memiliki sarana air bersih dan sanitasi

Misi keempat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan dengan tujuan yang telah ditetapkan pada misi keempat yang dijabarkan beberapa sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, perlindungan sosial, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - 2) Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan sasaran:
- 1) Semakin berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan dan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan pelayanan administrasi desa.
 - 2) Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
 - 3) Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatnya keberdayaan perempuan.
 - 4) Meningkatnya rasa aman, nyaman transmigran di lokasi pemukiman transmigrasi.

Misi kelima mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat dengan tujuan yang telah ditetapkan pada misi kelima yang dijabarkan berupa sasaran yaitu meningkatkan apresiasi seni dan budaya dikalangan lembaga pendidikan dan masyarakat dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan event-event seni budaya daerah dan pelestarian kekeayaan budaya daerah.

Misi keenam menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN dengan tujuan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut:

a) Meningkatkan partisipasi politik dan kondusifitas lingkungan masyarakat, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum dan kesadaran bela negara.
- 2) Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

b) Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel, dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya pendapaan asli daerah dan meningkatnya status audit keuangan daerah oleh BPK.
- 2) Terjadinya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah.
- 3) Meningkatnya pengelolaan arsip daerah secara baku.
- 4) Meningkatnya jaringan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan.
- 5) Meningkatnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

c) Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung data statistik, dengan sasaran:

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan perencanaan-perencanaan normatif lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Tersusunnya data dan informasi statistik daerah yang *valid* dan *up to date* sesuai kebutuhan.

9. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Bone.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi (UU No. 25 Tahun 2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010, Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi diperlukan untuk memperjelas cara implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bone yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau adil dan merata. Dalam mencapai misi tersebut maka diperlukan suatu strategi yaitu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan seperti PONED dan PONEK serta menerapkan sertifikasi dan akreditasi RS dan PUSKESMAS. Serta adapun arah kebijakan pemerintah dalam hal ini yaitu peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) dan rujukan (Rumah Sakit). Serta

peningkatan penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta pengawasan obat dan makanan.

2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri. Adapun strateginya yaitu meningkatkan penyediaan bantuan operasional pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, serta penerapan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Serta arah kebijakannya yaitu peningkatan penyediaan bantuan operasional pendidikan dan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan jenjang pendidikan.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. Adapun strateginya yaitu optimalisasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan satu pintu, pemindahan perizinan yang masih ditangani oleh dinas /instansi tertentu ke SKPD yang menangani perizinan, peningkatan kerjasama, dengan stakeholder investasi, peningkatan infrastruktur pendukung investasi, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor. Serta arah kebijakannya peningkatan kuantitas jenis perizinan, peningkatan kualitas pelayanan perizinan satu pintu, dan pemberian insentif daerah bagi calon investor.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan. Adapun strateginya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Serta arah

kebijakannya yaitu peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajuan masyarakat. Adapun strateginya yaitu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seni budaya, penyelenggaraan event-event seni budaya daerah dan pelestarian kekayaan budaya daerah. Serta arah kebijakannya yaitu peningkatan penyelenggaraan dan partisipasi event-event budaya di tingkat daerah, provinsi dan nasional serta pelestarian kekayaan budaya.
6. Memperkuat budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN. Adapun strateginya meningkatkan pengetahuan mengenai hak politik masyarakat melalui pendidikan politik dan edukasi mengenai wawasan kebangsaan. Serta arah kebijakannya yaitu peningkatan pendidikan politik masyarakat.

10. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bone

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah kabupaten Bone. hal ini merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bone mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan umum Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Kabupaten Bone dipimpin sekretaris dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas.

- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Sub Bagian Kepegawaian

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

- a. Seksi Pendaftaran
- b. Seksi Pendataan dan Penilaian
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

4. Bidang pembukuan dan pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah, PBB dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

- a. Seksi pembukuan dan penerimaan
- b. Seksi pembukuan dan persediaan benda berharga
- c. Seksi pelaporan

5. Bidang penepatan dan penagihan

- a. Seksi penetapan dan pelayanan administrasi BPHTB dan PBB-P2
- b. Seksi pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan
- c. Seksi penagihan dan penyuluhan

6. Bidang perencanaan dan pengendalian operasional

Bidang perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengurusan rencana, pembinaan teknis pemungutan, penentuan pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.

- a. Seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan.
- b. Seksi pengendalian dan peningkatan.

7. Bidang pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar

- a. Seksi pengembangan pasar
- b. Seksi pendapatan

c. Seksi sarana dan prasarana.

Untuk operasionalisasi tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 73 orang PNS dan 154 orang Non PNS (tenaga kontrak) dari jumlah tersebut terdiri dari 36 laki-laki dan 37 perempuan. Dilhat dari golongan terbanyak adalah golongan III yaitu 36 orang, golongan II yaitu 30 orang, golongan IV sebanyak 4 orang dan golongan I sebanyak 3 orang, melihat kondisi ini Dipenda memiliki SDM yang cukup baik.

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) memiliki tenaga kontrak sebanyak 154 orang dibagi dalam 5 bidang tugas yaitu (1) pengelola administrasi penagihan pajak/retribusi 22 orang, (2) satpam/petugas keamanan 11 orang, (3) petugas kebersihan pasar sentral watampone 11 orang, (4) penagih pajak/retribusi daerah 8 orang dan (5) kolektor pada UPTD Lingkup Dinas Pnedapatan Daerah 102 orang.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bone mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bone. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreatifitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah dalam pendapatan asli daerah yaitu penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah,

laba badan UMD dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Jenis-pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Bone adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20-21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Adapun Dasar hukum Pemungutan Pajak Hotel:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel.
- d) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan.
- e) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel pada Kabupaten/kota dimaksud.

2. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pungutan atas pelayanan di restoran. Pelayanan adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran. Yang termasuk objek pajak hotel

adalah rumah makan, café, dan sebagainya. Berdasarkan PERDA kabupaten Bone No 5 Tahun 2011 pasal 1 tentang Pajak Restoran:

- a) Dengan Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran atau rumah makan.
- b) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran dengan pembayaran
- c) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

3. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan atas penyelenggaraan suatu hiburan di daerah hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan yang dipungut bayaran. Yang termasuk pajak hiburan berupa tontonan, kesenian, pertunjukan music, tari, sirkus dan sebagainya. Berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang pajak Hiburan, Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

4. Pajak reklame

Pajak reklame adalah salah satu komponen pajak daerah juga memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial di Kabupaten Bone. Reklame adalah benda, alat-alat atau bedia yang bentuk dan coraknya beragam yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang

yang ditempatkan atau dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2011 pasal 9 tentang Pajak

Reklame:

d) Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame

e) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Reklame Papan
- 2) Reklame Kain
- 3) Reklame selebaran
- 4) Reklame udara
- 5) Reklame apung
- 6) Reklame suara
- 7) Reklame film/slide
- 8) Reklame peragaan

5. Pajak penerangan jalan

Berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

Berdasarkan PERDA Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk bahan galian golongan c meliputi: fosfat, nitrat, batu kapur, tawas, dan marmer.

7. Pajak air bawah tanah

Pajak air bawah tanah adalah pajak atas kegiatan pengambilan tanah dikenakan tariff sebesar 20%. Tujuan pemungutan pajak air bawah tanah adalah untuk pengendalian pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah/ air permukaan dalam rangka konservasi sumberdaya air sekaligus untuk menggerakkan peran masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

8. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan

Mengenai bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam Undang-undang No 21 tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2000 disebutkan bahwa atas BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang BPHTB, adapun BPHTB tersebut terdiri atas, Jual beli, tukar menukar, hibah, waris, penunjukan barang dagang lelang pemekeraan usaha, dan hadiah.

9. Pajak sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet adalah setiap kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet dengan tarif sebesar 10%.

(a) Visi dan misi DISPENDA Kabupaten Bone

1. Visi

Dinas pendapatan daerah kabupaten bone mempunyai visi yaitu terwujudnya instansi yang profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, efisien dan efektif.

Visi ini mengandung frase optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Rincian frase ini adalah sebagai berikut:

- a) Instansi yang professional adalah instansi yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kreatif dan inovatif dalam pengembangan pendapatan daerah untuk membangun bone yang sejahtera. Optimal artinya mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperkuat sumber-sumber yang telah ada dan mengalih serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang belum terolah dengan memanfaatkan SDM yang ada.
- b) Efisien adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- c) Efektif adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan pada situasi dan kondisi waktu yang telah ditetapkan mampu meraih hasil sesuai dengan target dan harapan pemerintah daerah.

2. Misi

Dinas Pendapatan Kabupaten Bone juga mempunyai misi. Adapun misi tersebut yaitu:

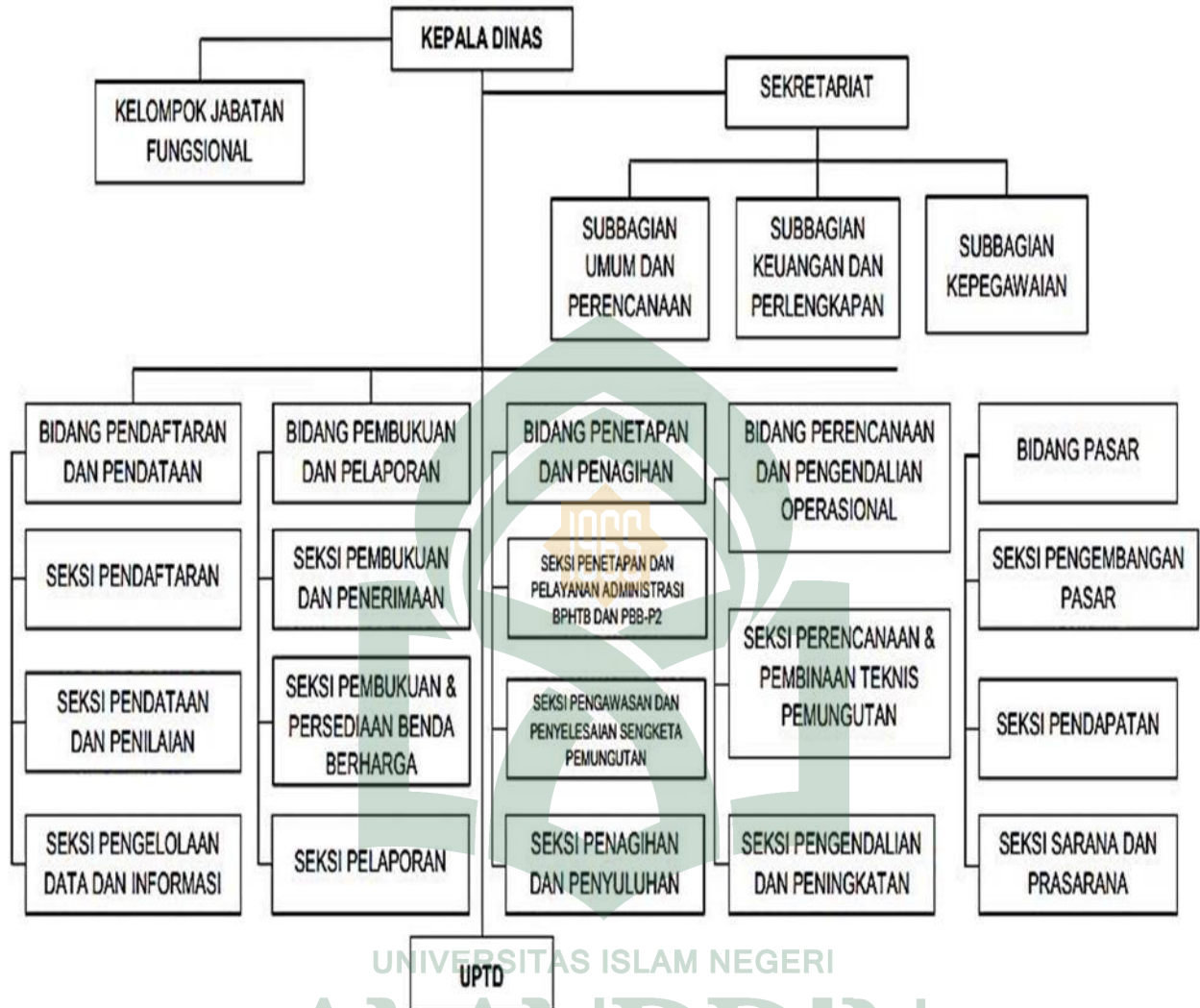
- a) Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah baik dikelola langsung maupun tidak langsung.
- b) Mengefisiensikan penggunaan sarana dan prasarana pendukung operasional dan menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.
- c) Meningkatkan tenaga teknis tenaga pengelola daerah sebagai ujung tombak pengelolaan pemungutan daerah.
- d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Meningkatkan pemahaman, kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- f) Mengoptimalkan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan.

(b) Tugas pokok dan fungsi DIPENDA Kabupaten Bone.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dispenda Kabupaten Bone didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2008 adapun tugas pokok tersebut adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh bupati.
2. Menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan daerah.
3. Menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang-undangan mengenai peraturan daerah.
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan anggaran melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pendapatan asli daerah.
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan anggaran.
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
7. Memelihara dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone



Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

B. Pembahasan Penelitian

1. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bone.

Kebijakan pengelolaan pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Kebijakan tidak bisa bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan mendapat kendala dalam masyarakat. Suatu kebijakan juga harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta perhatian yang lebih terhadap kebijakan itu dikarenakan kebijakan antara private dan swasta memiliki perbedaan yang nyata (Gaffar, 1991:7). Berdasarkan penjelasan tersebut Di Kabupaten Bone melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak yang sesuai dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan pajak di Kabupaten Bone dapat berjalan dengan baik. Kebijakan pengelolaan pajak di Kabupaten Bone sampai saat ini masih belum bisa menerapkan zakat sebagai pengurang pajak sehingga sampai saat ini masyarakat Kabupaten Bone masih melakukan pembayaran berganda yaitu pajak dan zakat. Sesuai yang dikatakan Ibu Tifa Armanusa, SH selaku KABID pembukuan dan Pelaporan DIPENDA mengatakan bahwa:

“Untuk menjadikan Zakat sebagai pengurang pajak masih belum bisa diterapkan di Kabupaten Bone dikarenakan sampai saat ini masih banyak masyarakat tidak mengerti akan hal tersebut dan untuk mensosialisaikan hal tersebut masih belum dimasukkan dalam perencanaan kedepannya akan tetapi diharapkan hal tersebut mampu diterapkan di Kabupaten Bone sehingga pemerintah daerah

Kabupaten Bone tidak terlalu bergantung kepada dana perimbangan serta kesadaran masyarakat akan pajak menjadi meningkat dan pendapatan asli daerah pun ikut meningkat sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah menjadi maksimal dan mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Wawancara Pada Tanggal 5 April 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang pajak masih belum bisa diterapkan yang dikarenakan sosialisasinya yang masih belum direncanakan serta kesadaran akan masyarakat terhadap pajak yang masih kurang sehingga hal inilah yang membuat hal tersebut masih belum bisa diterapkan akan tetapi hal tersebut akan diusahakan. Pemerintah Kabupaten Bone harus lebih berusaha keras untuk mencapai hal tersebut dikarenakan untuk membuat masyarakat mengerti akan pentingnya pajak bukanlah persoalan yang mudah dan hal ini menjadi dasar dari suatu keberhasilan daerah tersebut. Adanya permasalahan tersebut diharapkan pula pemerintah daerah mampu menjadi pilar yang baik bagi masyarakat dan instansi sehingga kedepannya Kabupaten Bone mampu menjadi Kabupaten Yang lebih baik.

Dengan adanya hal tersebut yang memungkinkan bahwa ketakutan masyarakat lebih kepada sang pencipta daripada kepada pemerintah itu sendiri. Sehingga sampai saat ini Kabupaten Bone kebanyakan masih bertumpu pada dana perimbangan baik dana hasil pajak maupun bukan pajak. Kontribusi pendapatan terbesar Kabupaten Bone masih berasal dari dana perimbangan. Hal ini menandakan bahwa derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bone dalam kategori rendah, artinya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Dengan adanya hal tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih tegas dalam menetapkan suatu kebijakan sehingga masyarakat mampu menjadi pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Kebijakan pengelolaan pajak di Kabupaten Bone yang seutuhnya masih dalam tahap perbaikan yang artinya bahwa adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bone tidak seluruhnya mampu diikuti oleh masyarakat sehingga mengakibatkan Kabupaten Bone masih sangat bergantung pada dana perimbangan. Ini menjadi suatu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bone dikarenakan kebijakan pengelolaan pajak akan mempengaruhi segala aspek pemerintahan terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Sesuai yang dikatakan Bapak Alimuddin, S. Sos selaku sekretaris DIPENDA mengatakan bahwa :

“sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bone masih sangat bergantung pada dana perimbangan dan hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Bone sendiri sehingga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten meningkat dan ketergantungan kepada dana perimbangan tidak semakin menjadi-jadi, serta sampai saat ini masyarakat masih berada ditingkat bawah untuk kesadaran mereka dalam membayar pajak sehingga ini juga memberikan dampak yang kurang baik dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah”. (Wawancara Tanggal 27 Maret 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih kurang sehingga hal ini menyulitkan bagi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah serta dengan hal ini pula pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan. Kesadaran dari masyarakat akan pajak yang kurang baik sehingga ini juga memberikan dampak bagi pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan pengelolaan pajak dikarenakan sikap acuh tak acuh dari masyarakat itu sendiri akan

pajak yang kurang sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah tidak berjalan maksimal. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk lebih tegas kepada masyarakat tentang sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak sehingga pembangunan mampu berjalan dengan baik.

Kebijakan pengelolaan pajak yang masih dalam tahap penyesuaian kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sehingga hal ini berdampak kepada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dimana pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah Kabupaten Bone. Penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang masih butuh perhatian khusus bagi pemerintah daerah diharapkan untuk kedepannya lebih memperhatikan aspek tersebut sehingga pemerintah daerah mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Penyelenggaraan keuangan pemerintah Kabupaten Bone yang masih bertumpu pada dana perimbangan hal ini memberikan gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone masih belum memadai sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah belum mampu mencakup segala aspek dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat.

2. Perspektif Komitmen Organisasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Pajak

Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bone.

Komitmen organisasi merupakan salah satu kunci penting yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Aktami, 2008). Komitmen organisasi adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi

Indarto dan Ayu (Mathiew dan Zajac, 2011:35). Menurut Tobing (Porter et al., 2009:32) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif individu terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu, yang dicirikan dengan tiga faktor psikologis: (1) keinginan yang kuat untuk tetap menjadi organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi organisasi dan (3) kepercayaan yang pasti dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.

Kepemimpinan sebagai suatu proses dan perilaku untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Komitmen dan seluruh komponen organisasi pemerintah daerah adalah kesepakatan antara kepala dan satuan kerja perangkat daerah beserta seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran sesuai dengan Renstra SKPD. Mowday, Porter dan Steers (1982) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai: *the relative strength of an individual's identification with and involvement in particular organization*. Definisi ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bone sudah menerapkan komitmen dalam organisasinya sendiri akan tetapi masih belum mampu dikatakan loyal dalam organisasinya sendiri dikarenakan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan

keuangan pemerintah daerah masih memerlukan perhatian khusus dan kerja keras untuk seluruh aspek pemerintahan. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa penerapan komitmen dalam organisasi Di Kabupaten Bone masih belum mencapai tahap loyalitas hal ini dibuktikan dengan pelayanan kepada masyarakat yang masih kurang memadai serta masih sangat bergantung terhadap dana perimbangan yang jika dilihat potensi kekayaan alam Kabupaten Bone cukup menggiurkan akan tetapi pemerintah Kabupaten Bone masih belum mampu mencapai keseluruhannya. Komitmen yang ada dalam organisasi masih dikatakan belum loyal dikarenakan pula pembangunan hanya terpusat di kota saja sedangkan di pedesaan masih memiliki permasalahan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Komitmen itu sendiri ada dua yaitu komitmen organisasi dan komitmen dari diri sendiri, komitmen organisasi merupakan kesepakatan dari seluruh aparat dalam pemerintahan itu dan komitmen diri sendiri adalah kemauan yang timbul dari dalam diri pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Suksesnya suatu perwujudan dari komitmen organisasi itu adalah faktor keinginan individu yang rela melaksanakannya yaitu komitmen pribadi. Sehingga dalam mencapai tujuan organisasi tidak akan terasa susah dalam mencapainya, akan tetapi inilah yang kurang di dalam Pemerintahan Kabupaten Bone yaitu komitmen dalam diri sendiri sehingga berdampak pada komitmen organisasi dan hal ini memberikan dampak yang perlu perhatian khusus pemerintah daerah untuk memperbaiki hal tersebut.

Komitmen organisasi yang masih belum sampai pada tahap loyal berdampak pula pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dimana pendidikan,

kesehatan masih membutuhkan perhatian khusus serta pembangunan yang hanya terpusat diperkotaan sehingga dipedesaan terbengkalai. Komitmen yang rapuh akan memberikan dampak yang buruk bagi penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dimana adanya desakan dan tekanan yang mampu mempengaruhi kadar loyalitas pemerintah menjadi menurun. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bone perlu memperhatikan keadaan seluruh masyarakatnya dan perlunya penanganan yang cepat dan tanggap untuk masyarakat sebagai tujuan utama dalam pemerintahan daerah. Keadaan seperti ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bone untuk lebih memperbaiki seluruh tatanan pemerintahan di Kabupaten Bone sehingga mampu mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat dan pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

a) Peranan *Stewardship Theory* Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah.

Stewardship Theory menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2012). Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesesuaian organisasi. *Stewardship Theory* dapat diterapkan organisasi publik yang sejak awal perkembangannya, *stewardship* mengacu pada pengelolaan suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan.

Peranan *stewardship theory* di Kabupaten Bone masih bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan dalam suatu organisasi pemerintahan di Kabupaten Bone

masih belum menunjukkan secara baik sikap dari komitmen organisasi yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak memadai. Dalam *stewardship theory* kepuasan menjadi target utama akan tetapi keadaan dalam organisasi yang masih belum memadai sehingga teori ini belum berjalan secara maksimal sehingga hal menjadi perhatian khusus serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menjadi *stewardship theory* sebagai bahan acuan dalam sistem organisasi pemerintahan sehingga kedepannya pemerintah Kabupaten Bone mampu menjadi contoh untuk daerah yang lain.

Stewardship theory menjadi panduan yang baik dalam menjalankan pemerintahan daerah dikarenakan arah dan tujuannya jelas sehingga tidak ada yang patut untuk disalahkan. Akan tetapi berbeda di Kabupaten Bone yang sampai saat ini belum memaksimalkan teori tersebut sehingga memberikan pula dampak kepada kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Teori ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam organisasi itu sendiri seperti komitmen yang masih belum bisa terwujud dengan baik serta penyelenggaraan keuangan yang masih belum memadai.

b) Peranan Teori Harapan Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut (Dharma, 2005:245) ketiga teori motivasi yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap falsafah manajemen kinerja adalah berkenaan dengan tujuan (*Goal*), dorongan (*Reinforcement*) dan harapan (*Expectancy*). Harapan dimaksudkan disini yaitu dengan diterapkannya suatu kebijakan dalam suatu daerah

diharapkan pemerintah daerah juga memberikan yang terbaik terhadap kebijakan tersebut demi meningkatkan penerimaan pajak serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Teori harapan memiliki dua aspek baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Aspek untuk pemerintah dimana dalam menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan diharapkan perlunya adanya komitmen dalam diri pemerintah serta tetap dalam rencana yang telah disepakatati yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Aspek untuk masyarakat diharapkan masyarakat dengan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selaku masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu kemajuan untuk daerah itu sendiri sehingga ada dorongan untuk membayar pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Masyarakat juga disini dihimbau untuk sesadar mungkin pentingnya suatu pembangunan dan keberlanjutan segala aktivitas dalam daerah itu sendiri.

Teori harapan sendiri di Kabupaten Bone sebenarnya sudah dijalankan akan tetapi pelaksanaannya masih memerlukan aksi lebih untuk mencapai tahap maksimal. Teori harapan sendiri di Kabupaten Bone sudah jalan sebagai bukti bahwa yang diharapkan oleh masyarakat baik itu pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan itu sendiri sudah dimasukkan dalam visi misi pemerintah Kabupaten Bone yang selama masih membutuhkan perhatian yang maksimal dari pemerintah. Harapan dari pemerintah Kabupaten Bone sendiri yaitu diharapkan masyarakat agar sadar betapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan daerah, akan tetapi masih sedikit yang peduli dengan hal ini sehingga teori belum bisa dikatakan berjalan secara maksimal. Sehingga diharapkan baik pemerintah dan masyarakat agar

mampu menjadikan teori sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan dikarenakan di dalam teori ini sendiri sudah dijelaskan keinginan dari masyarakat serta tindakan yang harus diperbuat oleh pemerintah itu sendiri sehingga terjadi kesimbungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Teori harapan memberikan gambaran kepada pemerintah untuk menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dikarenakan PAD itu sendiri menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah daerah. Akan tetapi berbeda di Kabupaten Bone yang masih bertumpu pada dana perimbangan sehingga hal ini memberikan gambaran yang kurang baik masyarakat. Teori ini pula akan berdampak kepada kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah dimana dalam teori dijelaskan pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama, begitu pula pada kebijakan pengelolaan pajak dikarenakan masyarakat masih banyak yang kurang peduli dengan pentingnya membayar pajak sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah juga menjadi terhambat dan hal ini mengakibatkan pemerintah daerah akan selalu bergantung pada dana perimbangan.

c) Peranan Teori Bakti Dalam Kebijakan Pengelolaan Pajak dan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah.

Teori ini dikemukakan oleh Resmi (2009:6) teori ini mengutamakan kepentingan suatu daerah yang merupakan suatu kesatuan dari individu-individu dimana setiap masyarakat terikat oleh pemerintahnya. Sehingga daerah memiliki hak atas masyarakat secara mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Sebaliknya

masyarakat harus sadar membayar pajak sebagai kewajiban aslinya sebagai tanda baktinya kepada daerah dan negara.

Masyarakat yang selaku wajib pajak sudah semestinya untuk memperhatikan hal tersebut dimana untuk memberikan perbaikan terhadap keberlangsungan daerah. Pemerintah yang menjadi figur dalam masyarakat yang seharusnya mampu memberikan hukuman bagi para wajib pajak yang telah melanggar suatu kebijakan dalam perpajakan sehingga pembangunan suatu daerah dapat tercapai serta kesejahteraan masyarakat mampu ditingkatkan. Masyarakat dan pemerintah merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang baik berkelanjutan sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu menjadi partner yang baik untuk mewujudkan hal tersebut.

Teori bakti ini sendiri di Kabupaten Bone sebenarnya sudah diterapkan akan tetapi kesadaran dari masyarakat yang masih kurang sehingga hal tersebut berdampak terhadap kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan daerah. Pemerintah dan masyarakat saling terikat satu sama lain sehingga ketika salah satu diantaranya terjadi kelalaian akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan di daerah itu sendiri. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bone bisa menjadi mitra yang baik diantara keduanya dalam mencapai pembangunan yang lebih baik. Teori bakti ini sendiri merupakan teori yang bagus jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertera akan tetapi berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bone yang mana di Kabupaten Bone itu sendiri keterkaitan antara masyarakat dan pemerintah masih belum maksimal sehingga

masyarakat ada yang acuh tak acuh dengan pembayaran pajak sendiri sehingga hal ini menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut. Ketika masyarakat dan pemerintah membentuk satu kesatuan yang baik maka suatu daerah akan memberikan suatu citra yang baik bagi daerah yang lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone untuk saling menyadari betapa pentingnya pajak serta kerjasama yang baik dalam pembangunan daerah yang lebih baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan serta rumusan masalah mengenai Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi Kabupaten Bone, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bone masih bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan kesadaran dari masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang tidak membayar pajak sehingga pengelolaan pajak tidak maksimal. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan sanksi yang kurang tegas sehingga hal ini berdampak pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah tidak berjalan secara maksimal serta pembangunan yang tidak merata yang dikarenakan kurangnya pendapatan daerah tersebut. Hal ini yang mengakibatkan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan untuk membiayai segala fasilitas daerah yang hal ini mampu memberikan pandangan yang kurang baik dikarenakan keterbatasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri.

2. Perspektif komitmen organisasi terhadap kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bone ini sendiri masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari para aparat itu sendiri kepada masyarakatnya, sementara perlunya hubungan yang kuat antara kesesuaian organisasi dengan kepuasan masyarakat. Di Kabupaten Bone masih belum menunjukkan secara baik sikap dari komitmen organisasi yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak memadai. Disamping itu pula, masih banyaknya kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan kelompok sehingga komitmen organisasi itu sendiri masih perlu ditanamkan dalam diri setiap aparat dalam organisasi tersebut. Kurangnya komitmen tersebut sehingga berdampak pula pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang belum maksimal dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan yang tidak merata merupakan efek dari kurangnya komitmen dalam suatu organisasi dalam menjalankan seluruh visi-misi yang ada.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan dari berbagai bidang seperti yang dijelaskan sebelumnya diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi dan menetapkan kebijakan pengelolaan pajak sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah mampu mencapai hasil yang maksimal. Diharapkan pula bagi seluruh aparat pemerintah untuk lebih menanamkan

sikap komitmen dalam diri pribadi untuk mencapai komitmen organisasi yang akan berdampak pada penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Keselarasan dalam hal komitmen organisasi dan teori stewardship perlu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Karena terkadang organisasi paham akan komitmennya akan tetapi pada saat pertanggungjawaban terjadi penyelewengan. Serta diharapkan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan seluruh kondisi masyarakatnya sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kota dan merata diseluruh pelosok daerah serta mampu memanfaatkan potensi yang ada dalam daerah tersebut dan tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dan Muhammad S. K. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Afan, G. 1991. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Ahmad, Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Aktami, B. 2008. *Kontribusi Kepuasan Kerja Dan Iklim Organisasi Terhadap Komitmen Karyawan*. Paper. Universitas Gunadarma.
- Aragon, Fernando. 2009. The Flypaper Effect Revisited. Economic Organization And Publik Policy Research. *Journal Sticerd London Of School Of Economic*4.
- Bahagijo, Sugeng. 2014. Pajak Super Kepada Superkaya Perancis dan Pemilu Indonesia 2014 (Analisa INFID No 1).
- Baihaqi, 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Fairness* 1, no 3 h 243-253.
- Bardhan, Pranab. 2002. Decentralization Of Governance and Development. *Journal Of Economic Perspectif*. Vol. IV.PP.185-205.
- Black, D.A., and W.E. Hoyt 1989.Bidding for firms. *American Journal Of Economic*.79,1249-1256.
- Brennan, Geoffrey dan Buchanan, James 1980. Tax Limits and The Logic of Constitutional Restriction, dalam Democratic Choice and Taxation :A Theoretical and Empirical Analysis. Hettich,W. And Winer, S. L., *Journal Of Economic Publik* Cambridge University. PP.20-22.
- Brueckner, J.K and H. Kim 2003. Urban sprawl and the property tax, International Tax and Public Finance. *Journal Of Economic*.10, 5-23.
- Deddy, S.B & D. Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Erlina. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis: Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Kedua. Universitas Sumatera Utara.

- Haaparanta, P. 1996. Competition for foreign direct investment. *Journal of Public Economics*. 63, 141-153.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Rahmawati. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Academica Fisip Untad*. Vol 04.816-829.
- Hoque, Zahirul And Adams. 2008. Measuring Public Performance: A Study Of Government Departments In Australia. *Journal Of Economic Public*. Vol. IV. PP.79-87.
- Huizinga, H., and S.B. Nielsen 2000. The taxation of interest in Europe: a minimum withholdingtax? In: S. Cnossen (ed.), Taxing capital income in the European Union, *Journal Of Economic Oxford University*. 135-160.
- Indarto Stefani Lily Indarto dan Ayu, S. Dyah . 2011. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, Dan Job Relevant Information (Jri). *Seri Kajian Ilmiah*, 14, no. 1 : h.1-44.
- Kaho, J. Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RepublikIndonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Rajawali.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Andi.
- Meutia, Fatchanie. 2007. Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. *Jurnal Keuangan*. 45-67.
- Moleong, L. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mowday. R. T. Porter, L.& Stress, R. M. 1982. Employee-organisation linkages: the psychology of commitment, absenteeism and turnover. *Journal Of Psychology*. Vol IV. PP. 543-589.

- Murphy. K. 2002. Procedural justice and the Australian Taxation Office: A study of scheme investors. Centre for Tax System Integrity Working *Journal Of Tax* Canberra: Australian National University. 35-56.
- Musgrave, Richard Abel dan Peggy B Musgrave. 1984. Public Finance in Theory and Practice, *Journal Of Economic Publik*. Vol.V. PP. 354-365.
- Norregaard, John. 2013. Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementation Challenges. *Journal Of Tax*. 13(129).
- O'Reilly. 1989. Organizational Commitment and Psychological Attachment; The Affective Commitment Identification, and Internalization on Pro Social Behavior. *Journal Of Applied Psychology*. Vol IV. PP. 471-493.
- Pamuji, Kadar. 2014. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). *Jurnal Dinamika Hukum*. 431-443.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2011. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Podrug, N. 2011. The Strategic Role Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving Corporate Citizenship. *Ekonomski Pregled*. Vol. 62 (7-8).
- Poulson, Barry W. And Jules Gordon Kaplan. 2008. State Income Taxes and Economic Growth. *Cato Journal*. Vol 28, No. 1, pp : 53-71.
- Raharjo, Eko. 2012. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi (*Agency Theory Vs Stewardship Theory In The Accounting Perspective*).
- Robbins. S. P., Coulter. M. (2012). *Management*. Eleventh Edition. Jakarta: England.
- Sari, L. P. Dian Metta, I M. P. Adiputra, dan G. A. Yuniarta. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung). *Jurusan Akuntansi*. 2. No. 1. h.1-10.
- Siti, Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Surya, Dharma. 2005. *Manajemen Kinerja; Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Penerbit
- Sulistiany. 2011. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Depok.3(2).10-15.Pustaka Pelajar.
- Supriyatno, Eko. 2015. *Zakat sebagai pengurang pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak*. Malaysia.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tobing, Diana Sulianti K. L. 2009. Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja PT. Perkebunan Nusantara III di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.11 no. 1 : h. 31-37
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang sumber pendapatan daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004, Tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun.2004 Tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

L

A

M

P

I

R

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

LAMPIRAN MANUSKRIP

Kebijakan pengelolaan pajak di dalam praktiknya tidak terlepas dari permasalahan. Praktik perpajakan di berbagai Negara memperlihatkan bahwa pajak justru menjadi salah satu sumber penyebab dari ketimpangan. Kelompok super kaya justru membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat kaya atau menengah dikarenakan tarif yang rendah. Sehingga pengelolaan pajak yang nantinya akan diselenggarakan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan komitmen organisasi dalam pelaksanaannya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

1. Bagaimana bentuk kebijakan pengelolaan pajak sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
2. Bagaimana pengelolaan pajak bisa dijadikan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya suatu daerah?
3. Bagaimana bentuk pengelolaan pajak disuatu daerah mampu dikatakan efektif atau tidak?
4. Bagaimana cara mengukur pengelolaan pajak sehingga bisa dikatakan efektif?
5. Bagaimana permasalahan yang ditimbulkan dalam pengelolaan pajak?
6. Bagaimana cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak agar umat islam tidak dikenakan pembayaran berganda yaitu pajak sebagai pengurang zakat?

7. Bagaimana langkah pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan pajak sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam masyarakat?
8. Bagaimana cara agar umat islam tidak mendapatkan pembayaran pajak dan mampu meningkatkan pendapatan daerah?
9. Bagaimana cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak agar umat islam tidak dikenakan pembayaran berganda yaitu pajak sebagai pengurang zakat?
10. Bagaimana langkah pemerintah dalam membuat suatu keputusan sehingga tujuannya dapat tercapai?
11. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah ?
12. Bagaimana suatu kebijakan dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai sedangkan yang akan dilaksanakan dilapangan harus sesuai dengan visi-misi yang ada?
13. Bagaimana suatu penyelenggaraan itu mampu terwujud sesuai yang diharapkan ketika perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban hanya oknum yang sama?

14. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa aparat yang berkecimpung dalam organisasi tersebut telah menanamkan sikap komitmen terhadap organisasinya?
15. Bagaimana bentuk penyimpangan yang ditimbulkan apabila dalam diri sendiri sikap komitmen itu kurang?



Daftar Pertanyaan Dan Hasil Pertanyaan

Wawancara

Nama : Syamsuddin

Jabatan: Masyarakat

Hari : Minggu, 25 Maret 2018

1. Bagaimana bentuk kebijakan pengelolaan pajak sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat?

Jawaban: Saat ini pemerintah daerah Di Kabupaten Bone belum memberikan kinerja yang maksimal, baik dalam penerapan kebijakan pengelolaan pajak dan penyelenggaraan keuangan sehingga pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan masih kurang merata serta angka pengangguran masih tinggi untuk Kabupaten Bone.

2. Bagaimana pengelolaan pajak bisa dijadikan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya suatu daerah?

Jawaban : Pajak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dimana setiap kemajuan dari suatu daerah yang berperan sangat penting dari terwujudnya segala kepentingan dari daerah tersebut yaitu dari pajak sehingga pajak dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan dari suatu daerah.

3. Bagaimana bentuk pengelolaan pajak disuatu daerah mampu dikatakan efektif atau tidak?

Jawaban : Pengelolaan pajak dikatakan efektif ketika jumlah pajak yang diterima sesuai dengan apa yang diberikan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

4. Bagaimana cara mengukur pengelolaan pajak sehingga bisa dikatakan efektif?

Jawaban : caranya yaitu dengan melihat penerimaan pajak dan perkembangan yang ada di daerah tersebut jika penerimaan pajak dalam suatu daerah baik dan kita perlu melihat perkembangan dari pembangunannya jika baik maka peneglolaan pajaknya efektif.

5. Bagaimana permasalahan yang ditimbulkan dalam pengelolaan pajak?

Jawaban : permasalahannya biasanya yaitu kesejahteraannya tidak setara, pembangunan yang tidak setara dan terkadang terjadi penggelapan pajak sehingga hanya dinikmati oleh kaum elit.

Nama : Tifa Armanusa, SH

Jabatan: KABID Pembukuan dan Pelaporan DIPENDA

Hari : Kamis, 05 April 2018

1. Bagaimana cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak agar umat islam tidak dikenakan pembayaran berganda yaitu pajak sebagai pengurang zakat?

Jawaban : Untuk menjadikan Zakat sebagai pengurang pajak masih belum bisa diterapkan di Kabupaten Bone dikarenakan sampai saat ini masih banyak masyarakat tidak mengerti akan hal tersebut dan untuk mensosialisaikan hal tersebut masih belum dimasukkan dalam perencanaan kedepannya akan tetapi diharapkan hal tersebut mampu diterapkan di Kabupaten Bone sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bone tidak terlalu bergantung kepada dana perimbangan serta kesadaran masyarakat akan pajak menjadi meningkat dan pendapatan asli daerah pun ikut meningkat sehingga penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah menjadi maksimal dan mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Bagaimana langkah pemerintah dalam membuat kebijakan pengelolaan pajak sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam masyarakat?

Jawaban : untuk mencapai kebijakan dalam pengelolaan pajak pemerintah perlu menerapkan zakat sebagai pengurang pajak sehingga umat muslim

tidak merasa mendapat pembayaran berganda sehingga pajak bisa berjalan dengan baik begitupun dengan zakat.

3. Bagaimana cara agar umat islam tidak mendapatkan pembayaran pajak dan mampu meningkatkan pendapatan daerah?

Jawaban : caranya yaitu jadikan zakat sebagai pengurang pajak sehingga umat muslim tidak mendapat pembayaran berganda serta pajak dapat berjalan dengan baik dan zakat juga dapat berjalan dengan baik.

4. Bagaimana cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pajak agar umat islam tidak dikenakan pembayaran berganda yaitu pajak sebagai pengurang zakat?

Jawaban : untuk menjalankan langkah ini perlu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat supaya masyarakat lebih dapat memahami sehingga tidak terjadi informasi asimetri antara pemerintah dan masyarakat.

5. Bagaimana langkah pemerintah dalam membuat suatu keputusan sehingga tujuannya dapat tercapai?

Jawaban : Dalam membuat keputusan pemerintah harus tegas dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga masyarakat juga ikut serta dalam menginginkan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah setempat sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai dan terlaksana dalam daerah tersebut.

Nama : Alimuddin, S.Sos

Jabatan: Sekretaris DIPENDA

Hari : Selasa, 27 Maret 2018

1. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah ?

Jawaban : Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bone masih sangat bergantung pada dana perimbangan dan hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Bone sendiri sehingga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten meningkat dan ketergantungan kepada dana perimbangan tidak semakin menjadi-jadi, serta sampai saat ini masyarakat masih berada ditingkat bawah untuk kesadaran mereka dalam membayar pajak sehingga ini juga memberikan dampak yang kurang baik dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagaimana suatu kebijakan dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai sedangkan yang akan dilaksanakan dilapangan harus sesuai dengan visi-misi yang ada?

Jawaban : kebijakan dikatakan dapat bertentangan dengan nilai-nilai dimasyarakat dimana dalam melaksanakan kebijakan melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga lebih baiknya pemerintah dalam menjalankan kebijakan tidak melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam

masyarakat sehingga apa yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

3. Bagaimana suatu penyelenggaraan itu mampu terwujud sesuai yang diharapkan ketika perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban hanya oknum yang sama?

Jawaban : untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan maka perlu pengawasan yang ketat sehingga tidak menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan.

4. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa aparat yang berkecimpung dalam organisasi tersebut telah menanamkan sikap komitmen terhadap organisasinya?

Jawaban : caranya yaitu kita melihat kinerjanya apakah sesuai dengan visinya atau tidak serta kita lihat sejauh mana peran pemerintah dalam menjalankan hal tersebut dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat atas apa yang dilakukannya.

5. Bagaimana bentuk penyimpangan yang ditimbulkan apabila dalam diri sendiri sikap komitmen itu kurang?

Jawaban : apabila dalam diri pemerintah tidak menanamkan sikap komitmen maka akan timbul sikap acuh tak acuh kepada masyarakat, lebih mementingkan kepentingan golongan elit, dan hanya memikirkan dirinya sendiri sehingga melupakan tujuan sejati dari pemerintahan, hal ini akan berimbas pada pembangunan yang tidak merata,

pelayanan kesehatan yang tidak baik serta penindasan kaum
menengah kebawah.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1300 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN Akuntansi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Syahrani**, Nim: **10800113160** tertanggal **24 Agustus 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah : Perspektif Komitmen Organisasi 9Studi Kasus pada Kabupaten Bone** "
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu
c. pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Jamaluddin M., SE., M.Si.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
2. **Puspita Hardianti Anwar, SE., MA.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 28 Agustus 2017



Tembusan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip



ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara SYAHRAENI: 10800113160, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan Judul, "**Kebijakan Pengelolaan Pajak Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah : Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada Kabupaten Bone)**", memandang bahwa Proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar **proposal**.

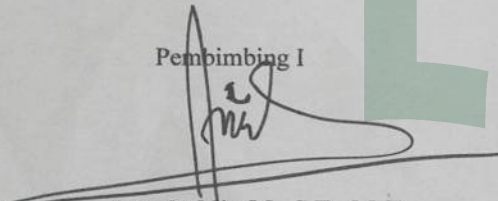
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata-Gowa,

2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Jamaluddin M., S.E., M.Si
NIP. 19720611 200801 1 013


Puspita Hardianti Anwar., SE., Msi., Ak., CA., CPAI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hal : PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL

Gowa, 12 Maret 2018

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Syahraeni
NIM : 10800113160
Semester : DELAPAN (VIII)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada kabupaten Bone)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Mengetujui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin, M.SE., M. Si
Nip. 197206112008011013

Yang bermohon

Syahraeni
10800113160

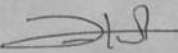
Disposisi:

SEMINAR PROPOSAL tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. TIM SEMINAR PROPOSAL

Ketua :
Sekertaris :
Pembimbing I : Jamaluddin M, SE., M.Si
Pembimbing II : Puspita Hardianti Anwar., SE., M. Si, Ak., CA., CP
Penguji I :
Penguji II :
Pelaksana :
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam :

Gowa, 13.
12 Maret 2018
An/Dekan,
Kasubag Akademik


Nurmiyah Muin, S.IP., MM
NIP.19660526 199403 2 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Telp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangjati, Makassar Telp. (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : 2427/EB.I/PP.00.9/2018
Lampiran : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal**
A.n. Syahraeni/10800113160

Samata, 19 Maret 2018

Kepada Yth :

1. **Jamaluddin M, SE., M.Si. Sebagai Pembimbing I**
2. **Puspita Hardianti Anwar., SE., M. Si., Ak., CA., CP. Sebagai Pembimbing II**

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami mengundang bapak untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018
Waktu : 09.00 – 12.00
Judul Skripsi : Kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada kabupaten Bone)
Tempat : Ruang . 106

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Wasalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa . ☎ 424835,
Fax424836

PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

Nomor : /EB/2018

Proposal penelitian saudara **SYAHRAENI**, NIM: 10800113160, Mahasiswa Jurusan **AKUNTANSI** pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi draft proposal penelitian dengan judul “**Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone)**”. Memandang bahwa draft proposal penelitian telah diterima dan memenuhi persyaratan ilmiah untuk mengikuti ujian KOMPREHENSIF dan melaksanakan penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, Mei 2018
Penyusun,

SYAHRAENI
NIM. 10800113160

Pembimbing I

Pembimbing II

Jamaluddin M., S.E., M.Si
NIP. 19720611 200801 1 013

Puspita H. Anwar, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI

Diketahui oleh :
Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin M., S.E., M.Si
NIP. 19720611 200801 1 013

Hal : PERMOHONAN UJIAN KOMPREHENSIF

Gowa, 15 Mei 2018

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Syahraeni
NIM : 10800113160
Semester : SEPULUH (X)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada kabupaten Bone)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Menyetujui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin, M.SE., M. Si
Nip. 197206112008011013

Yang bermohon

Syahraeni
10800113160

Disposisi:

UJIAN KOMPREHENSIF tersebut dilaksanakan sebagai berikut :


I. TIM UJIAN KOMPREHENSIF

Ketua :
Sekertaris :
Pembimbing I : Jamaluddin M, SE., M.Si
Pembimbing II : Puspita Hardianti Anwar., SE., M. Si. Ak., CA., CP .AI
Penguji I :
Penguji II :
Pelaksana :
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam :

Gowa, 15 Mei 2018

An/Dekan,

Kasubag Akademik


Nurmiah Muin, S.IP.,MM
NIP.19660526 199403 2 004



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 813 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Syahrani** : NIM: 10800113160
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Sekretaris | : Drs. H. M. Ridwan, M.Si |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. |
| Penguji Akuntansi Keuangan | : Memen Suwandi, SE., M.Si. |
| Penguji Auditing | : Uince Bulutoding, SE., M.Si., Ak. |
| Pelaksana | : Amidar Hamid, SE. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 25 Mei 2018
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
 2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
 3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

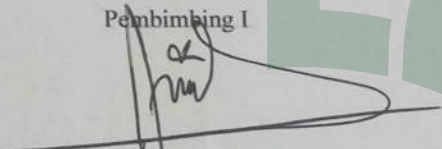
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara SYAHRAENI: 10800113160, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, "**Kebijakan Pengelolaan Pajak Dalam Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil.

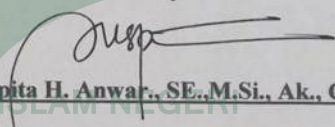
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 2018

Pembimbing I


Jamaluddin M, SE., M.Si.
NIP. 19720611 200801 1 013

Pembimbing II


Puspita H. Anwar., SE., M.Si., Ak., CA., CPAI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Hal : PERMOHONAN SEMINAR HASIL

Samata-Gowa, 3 Agustus 2018

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Syahraeni
NIM : 10800113160
Semester : SEPULUH (X)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada kabupaten Bone)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Menyetujui
Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin, M. SE., M. Si
Nip. 197206112008011013

Yang bermohon

Syahraeni
10800113160

Disposisi:

SEMINAR HASIL tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

I. **TIM SEMINAR HASIL**

Ketua :
Sekertaris :
Pembimbing I : Jamaluddin M. SE., M.Si
Pembimbing II : Puspita Hardianti Anwar., SE., M. Si., Ak., CA., CP
Penguji I :
Penguji II :
Pelaksana :
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata-Gowa, 3 Agustus 2018

An. Dekan,
Kasubag Akademik

Nurmiah Muin, S.IP., MM
NIP. 19660526 199403 2 004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **5615** /EB.1/PP.00.9/08/2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samata, Agustus 2018

Kepada Yth
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Syahraeni
NIM : 10800113160
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : Kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada Kabupaten Bone)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018
Waktu : 13.00 - 14.00 WITA
Tempat : Ruang Seminar 204

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1187 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Syahrani, NIM : 10800113160
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Syahrani, NIM: 10800113160** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Pembimbing II : Puspita H. Anwar, SE., M.Si. Ak. CA., CPAI.
Penguji I : Dr. Amiruddin K, M.EI
Penguji II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Drs. H. M. Ridwan, M.Si.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
pada tanggal : 15 Agustus 2018
Dekan,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektori UIN Alauddin Makassar @ Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip

Hal : PERMOHONAN UJIAN MUNAQASYAH

Samata-Gowa, 28 Agustus 2018

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Syahraeni
NIM : 10800113160
Semester : SEPULUH (X)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Kebijakan pengelolaan pajak Daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada Pemda kabupaten Bone)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Menyetujui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin, M.SE., M. Si
Nip.197206112008011013

Yang bermohon

Syahraeni
10800113160

Disposisi:

UJIAN MUNAQASYAH tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. TIM UJIAN MUNAQASYAH

Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pembimbing I	:	Jamaluddin M. SE., M. Si
Pembimbing II	:	Puspita Hardianti Anwar., SE., M. Si., Ak., CA., CP
Penguji I	:	Dr. Amiruddin K. M.El
Penguji II	:	Hj. Wahidah Abdullah. M. Ag., M. Pd
Pelaksana	:	
Tempat	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam	:	

Samata-Gowa, 28 Agustus 2018

An/Dekan,

Kasubag Akademik

Nurmiah Muin, S.IP.,MM
NIP.19660526 199403 2 004


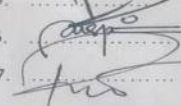
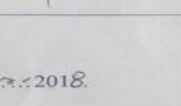



**NAMA BERITA ACARA UJIAN HASIL
PROGRAM STRATA SATU
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Pada hari ini Selasa Tanggal 21 Agustus Tahun 2018 Jam 09.00 - 16.00 WITA Panitia Ujian (SK Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor 1187 Tahun 2018) telah melaksanakan Ujian Hasil untuk memenuhi sebagian syarat Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar atas mahasiswa

Nama : Syahraeni
NIM : 10800113160
Jurusan : AKUNTANSI

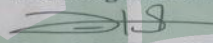
Judul Skripsi yang di Ujikan : Kebijakan pengelolaan pajak dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada Kabupaten Bone)

PANITIA UJIAN HASIL

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	Sekretaris	2. 
3	Dr. Amiruddin K, M.El	Penguji I	3. 
4	Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.	Penguji II	4. 
5	Jamaluddin M., SE., M.Si.	Pembimbing I	5. 
6	Puspita H. Anwar, SE., M.Si. Ak. CA., CPAI.	Pembimbing II	6. 
7	Drs. H. M. Ridwan, M.Si.	Pelaksana	7. 

Samata - Gowa, 22 Agustus 2018.

An. Dekan
Kasubbag Akademik


Nurmiah Muin, S.IP., M.M.
NIP. 19660526 199403 2 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara **Syhraeni** NIM : **10800113160**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **"Kebijakan Pengelolaan pajak daerah Dalam Penyelenggaraan keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone)"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada ujian **MUNAQASYAH**

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Dosen Penguji dan Pembimbing

Penguji I : Dr. Amiruddin K, M. EI (.....)

Penguji II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Jamaluddin M., SE., M.Si (.....)

Pembimbing II : Puspita H. Anwar, SE., M.Si. Ak. CA., CPAI (.....)

MAKASSAR



ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi saudara **Syahrani: 10800113160**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **"Kebijakan Pengelolaan pajak daerah Dalam Penyelenggaraan keuangan Pemerintah: Perspektif Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada PEMDA Kabupaten Bone)"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke MUNAQSAH

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 2018

Pembimbing I

Jamaluddin M., SE., M.Si
NIP. 19720611 200801 1 013

Pembimbing II

Puspita H. Anwar., SE., M.Si. Ak., CA., CPAI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hal : PERMOHONAN UJIAN MUNAQASYAH

Samata-Gowa, 28 Agustus 2018

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Syahraeni
NIM : 10800113160
Semester : SEPULUH (X)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Kebijakan pengelolaan pajak Daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada Pemda kabupaten Bone)

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Menyetujui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin, M.SE.,M. Si
Nip.197206112008011013

Yang bermohon

Syahraeni
10800113160

Disposisi:

UJIAN MUNAQASYAH tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

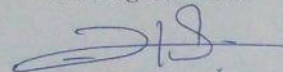
1. TIM UJIAN MUNAQASYAH

Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pembimbing I	:	Jamaluddin M, SE., M.Si
Pembimbing II	:	Puspita Hardianti Anwar., SE., M. Si., Ak., CA., CP
Penguji I	:	Dr. Amiruddin K, M.EI
Penguji II	:	Hj. Wahidah Abdullah, M.Ag.,M.Pd
Pelaksana	:	
Tempat	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam	:	

Samata-Gowa, 28 Agustus 2018

An/Dekan,

Kasubag Akademik



Nurmiah Muin, S.IP.,MM
NIP.19660526 199403 2 004



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : **PP.00.9/8/2018**
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, **30 Agustus 2018**

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian
Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Syahraeni
NIM : 10800113160
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : "Kebijakan pengelolaan pajak Daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada Pemda Kabupaten Bone)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Agustus 2018
Waktu : 09.00 - 12.00 Wita
Tempat : Ruang Seminar 204

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19681022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



UIN ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1335 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Syahraeni
NIM : 10800113160
Tanggal : 29 Agustus 2018
Mahasiswa Jurusan : AKUNTANSI
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Kebijakan pengelolaan pajak Daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada Pemda Kabupaten Bone)**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Penguji I : Dr. Amiruddin K, M.El
Penguji II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Pembimbing II : Puspita H. Anwar, SE., M.Si. Ak. CA., CPAI.
Pelaksana : Drs. H. M. Ridwan, M.Si.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 30 Agustus 2018
Dekan:

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221460

SURAT PERNYATAAN KESEDIAN MENGUJI

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing kiranya bisa menghadiri Ujian (* Seminar Hasil/ Munaqasyah) dengan jadwal tertera di bawah ini :

Nama : Syahraeni
Nim : 10800113160
Jurusan : AKUNTANSI
Judul : Kebijakan pengelolaan pajak Daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada Pemda Kabupaten Bone)
Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Agustus 2018

Dengan Tim Penguji sebagai berikut :

Penguji I : Dr. Amiruddin K, M.El
Penguji II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Pembimbing II : Puspita H. Anwar, SE., M.Si. Ak. CA., CPAI.

Demikian, atas kerjasamanya di ucapkan banyak terima kasih.

Samata, Agustus 2018
An. Dekan
Kasubbag Akademik

Nurmiah Muin, S.IP., MM.
NIP. 19660526 199403 2 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Keterangan :

- Jadwal ujian hasil/munaqasyah keluar setelah mengumpul surat pernyataan kesediaan menguji, 3 hari sebelum tanggal yang telah ditetapkan
- Jika surat pernyataan kesediaan ini sudah disetujui dan berhalangan hadir pada waktu yang telah ditetapkan, maka ujian tersebut di tunda pada ujian berikutnya.
- Berita acara terbit pada saat ujian berlangsung
- *Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata- Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

BERITA ACARA UJIAN AKHIR/MUNAQASYAH SKRIPSI DAN YUDISIUM

Pada hari ini **Jumat Tanggal 31 Agustus** tahun 2018 pukul **09.00 - 12.00 Wita** sampai selesai berdasarkan Surat Keputusan tentang Ujian Akhir/Munaqasyah Skripsi dan Yudisium Nomor **1335 Tahun 2018** telah dilaksanakan Ujian Akhir/Munaqasyah Skripsi dan Yudisium terhadap mahasiswa:

Nama : **Syahraeni**
NIM : **10800113160**
Jurusan : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **Kebijakan pengelolaan pajak Daerah dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah : Perspektif komitmen organisasi (Studi kasus pada Pemda Kabupaten Bone)**

Dengan hasil ujian sebagai berikut:

Kategori :
Nilai :
Predikat :

Berdasarkan hasil ujian di atas maka atas nama Dekan, Ketua Ujian Akhir/Munaqasyah Skripsi meyudisium saudara (i) **Syahraeni**

Berita acara ini dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ujian, Penguji, Pembimbing, Pelaksana, dan mahasiswa yang diuji.

Samata, 2018

Ketua : **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.** (.....)
Sekretaris : **Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.** (.....)
Pembimbing I : **Jamaluddin M., SE., M.Si.** (.....)
Pembimbing II : **Puspita H. Anwar, SE., M.Si. Ak. CA., CPAI.** (.....)
Penguji I : **Dr. Amiruddin K, M.EI** (.....)
Penguji II : **Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.** (.....)
Pelaksana : **Drs. H. M. Ridwan, M.Si.** (.....)
Mahasiswa yang diuji : **Syahraeni** (.....)

Mengetahui,
An. Dekan
Kasubag Akademik

Nurmiah Muin, S.IP., MM.
NIP. 19660526 199403 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.354/III/IP/DPMPTSP/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **SYAHRAENI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 10800113160
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Batu Gading Kec. Mare
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
KEUANGAN PEMERINTAH PERSPEKTIF KOMITMEN ORGANISASI (STUDI KASUS PADA
PMDA KABUPATEN BONE)”**

Lamanya Penelitian : 19 Maret 2018 s/d 19 April 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 19 Maret 2018

KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone di Watampone
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jln R.W. Monginsidi No. 5 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 92713 Tlp (0481) 21106 Fax (0481) 21106

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070/118/III/BAPENDA

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor : 070/12.354/III/IP/DPMPTSP/2018 Tanggal 19 Maret 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian Penulisan Skripsi An. **SYAHRAENI** untuk melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : A. HERMAN, SH, MH
N I P : 19620724 199003 3 1 008
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV
Jabatan : Kepala Bapenda Kab. Bone

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : SYAHRAENI
N I M : 10800113160
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar
Alamat : Desa Batu Gading Kec. Mare

Diberikan izin untuk melaksanakan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam rangka Penyusunan skripsi dengan Judul :

**“ KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
KEUANGAN PEMERINTAH PERSPEKTIF KOMITMEN ORGANISASI (STUDY
KASUS PADA PEMDA KABUPATEN BONE) ”**

Lamanya Penelitian : 19 Maret 2018 s/d 19 April 2018

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 27 Maret 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



A. HERMAN, SH, MH
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19620724 199003 3 1 008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1982/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 2022/EB.I/PP.00.9/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SYAHRAENI**
Nomor Pokok : 10800113160
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEUANGAN
PEMERINTAH : PERSPEKTIF PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
KEUANGAN PEMERINTAH : PERSPEKTIF KOMITMEN ORGANISASI (STUDI KASUS PADA KABUPATEN
BONE) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Maret s/d 21 April 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 05 Maret 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

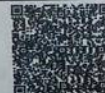
A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 05-03-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



RIWAYAT HIDUP



Assalamualaikum Wr. Wb. Saya bernama Syahraeni atau akrab dipanggil Rara, lahir di Batugading, 08 November 1995 tepatnya Di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ke 2 dari 5 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda Herman dan Ibunda Normalia. Penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) Inpres 12/79 Batugading pada tahun 2001 hingga 2007, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Batugading tahun 2007 sampai 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mare pada tahun 2010-2013, yang sekarang diganti menjadi SMA Negeri 2 Bone. kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Contact Person:

Email : Sahraherman@gmail.com

No. Hp: 0812-3312-3896

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R